



Kementerian PPN/
Bappenas



Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

MENGGERAKAN DESA MEMPERKUAT KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Pembelajaran dari Akademi Paradigta



pekka

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

MENGGERAKKAN DESA MEMPERKUAT KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Pembelajaran dari Akademi Paradigta

Chasan Ascholani

KOMPAK

Menggerakkan Desa Memperkuat Kepemimpinan Perempuan Pembelajaran dari Akademi Paradigta

ISBN: 978-623-6080-17-7

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©(2021) Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Penulis

Chasan Ascholani

Tim Dokumentasi

Dewi Novirianti

Melly Setyawati

Kontributor

Pemerintah Kabupaten Brebes

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara

Tim Diskusi

Ancilla Irwan

Emmy

Enurlaela Hasanah

Lilis Suryani

Ratna Fitriani

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi
communication@kompak.or.id

Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

KATA PENGANTAR

Pembangunan desa yang inklusif merupakan cita-cita bersama yang tidak dapat terwujud tanpa pelibatan dan partisipasi aktif semua pihak, terutama masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok masyarakat rentan. Kelompok perempuan yang sebelumnya seringkali terpinggirkan memiliki potensi besar untuk dapat mengambil peran strategis dan signifikan untuk berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif. Hal ini selaras dengan sasaran pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang didorong oleh berbagai Kementerian Lembaga termasuk oleh Kementerian Desa melalui Peraturan Menteri Desa PDTT No. 21/2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berbagai kajian dan pendokumentasian program selama ini menunjukkan, pelibatan perempuan (khususnya dalam musyawarah desa) dapat menjadi efek pengganda untuk menyasar agenda-agenda SDGs Desa lainnya seperti desa tanpa kemiskinan, desa peduli pendidikan, desa peduli kesehatan, desa sehat dan sejahtera, dan sebagainya.

KOMPAK, Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia) bersama Yayasan PeKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) mendorong upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kepemimpinan kelompok perempuan di tingkat desa, salah satunya melalui pelaksanaan program Akademi Paradigta. Akademi Paradigta merupakan model pendidikan alternatif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan di tingkat komunitas dalam proses perencanaan dan penganggaran di desa, serta untuk menjadi pemimpin di komunitas dan di desa. Hingga akhir tahun 2020, Akademi Paradigta telah melahirkan **3,450 kader perempuan** dan yang telah menjadi pemimpin desa, yaitu sebanyak 79 anggota BPD, 60 Perangkat Desa, dan 985 kader desa.

Pemerintah akan terus membangun dan meningkatkan keterlibatan perempuan, untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif bagi kelompok-kelompok warga rentan (kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, dan lainnya), yang diharapkan akan bermuara pada keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Untuk itu berbagai pembelajaran dari hasil pengembangan model dan proses implementasi Akademi Paradigta yang dituangkan dalam Laporan Pendokumentasian Akademi Paradigta ini disusun sebagai pengetahuan yang akan bermanfaat bagi pemerintah, pemerintah daerah dan desa serta para pihak yang terlibat dalam memperkuat kepemimpinan perempuan di desa.

Jakarta, Oktober 2021



Anna Winoto
KOMPAK Team Leader

KATA PENGANTAR

Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kaum perempuan Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan untuk mengaktualisasikan diri, mengakses, berpartisipasi dan menikmati proses serta hasil pembangunan setara dengan laki-laki. Hambatan- yang secara fundamental dirasakan oleh perempuan terkait erat dengan pandangan masyarakat bahwa perempuan tidak memiliki pengetahuan, kemampuan dan kepantasan untuk terlibat didalam pengambilan keputusan di ruang publik, apalagi terlibat dalam tata kelola pemerintahan dari tingkat desa hingga Nasional. Pandangan ini menyebabkan potensi dan suara perempuan tidak didengar dan diabaikan, dan ruang partisipasi perempuan yang telah diupayakan dengan berbagai peraturan, kebijakan dan program pemerintah hanya formalitas prosedural saja. Padahal perempuan merupakan separuh potensi kekuatan bangsa Indonesia, kebutuhan, pengalaman, gagasan, dan pemikiran perempuan yang spesifik merupakan sumber pengetahuan tak ternilai yang dapat mengatasi berbagai tantangan kehidupan di masyarakat.

Pengalaman Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) sejak tahun 2001 mengembangkan kepemimpinan perempuan kepala keluarga membuktikan hal ini. Sebagai kelompok yang paling miskin dan majinal dalam masyarakat, komunitas Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) mampu membuat perubahan tidak hanya pada diri dan keluarganya, namun bagi masyarakat luas. Mereka memimpin dan membantu masyarakat mendapatkan hal layanan publik termasuk terkait identitas hukum dan perlindungan sosial. Mereka mentransformasi hambatan menjadi tantangan untuk membuat perubahan yang sistematis dan mengakar.

Akademi Paradigta merupakan upaya Yayasan PEKKA untuk melembagakan proses-proses pemberdayaan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan pada komunitas Pekka selama ini menjadi sistem pendidikan non-formal untuk orang dewasa yang terstruktur dan sistematis bagi perempuan-perempuan di akar rumput khususnya di perdesaan dan perkampungan. Kurikulum Akademi Paradigta berbasis pengalaman kehidupan perempuan sebagai anggota keluarga dan masyarakat, sementara pendekatan dan metodologi pendidikan yang diterapkan berupa "training aksi" yang menitikberatkan pada praktek langsung dan refleksi. Penerapan sistem mentorships - belajar bersama teman, dilakukan sebagai strategy memastikan kesinambungan Akademi Paradigta yang akan dikembangkan sebagai sistem pendidikan non-formal berbasis komunitas di perdesaan dan perkampungan.

Tahun 2021 Akademi Paradigta memasuki usia 6 tahun perjalanannya, dan telah berkembang dengan berbagai kurikulum yang merespon perubahan dan perkembangan yang terjadi di berbagai konteks di Indonesia. Dukungan KOMPAK pada tiga tahun pertama pengembangan pilot program telah memungkinkan Akademi Paradigta membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan dan keberlanjutannya hingga saat ini. Kami menyambut baik dan menghargai upaya KOMPAK mendokumentasikan Akademi Pradigta dan menerbitkannya menjadi buku untuk mengidentifikasi model pemberdayaan perempuan, dan menyebarluaskan pengalaman dan pengetahuan Akademi Paradigta mengembangkan kepemimpinan perempuan. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi

bagi pemangku kepentingan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 12 Oktober 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned above a vertical line.

Nani Zulminarni; Pendiri dan Ketua Yayasan PEKKA
Penggagas Akademi Paradigta

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan	vii
1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	4
2. Metodologi	5
2.1. Batasan Pengertian Pemberdayaan dan Kepemimpinan Perempuan.....	6
2.2. Metode Pengambilan Data	6
2.3. Waktu Pelaksanaan Pendokumentasian	8
3. Akademi Paradigma dan Modalitas Lokal Penguatan Kepemimpinan Perempuan	9
3.1. Akademi Paradigma.....	10
3.1.1. Tujuan Akademi Paradigma.....	10
3.1.2. Struktur Pelaksanaan Akademi Paradigma.....	10
3.1.3. Peserta Akademi Paradigma	12
3.1.4. Metode Pelatihan	13
3.1.5. Modul Pelatihan	14
3.1.6. Tempat dan Waktu Pelatihan	16
3.1.7. Wisuda Peserta Akademi Paradigma.....	16
3.1.8. Pendanaan Akademi Paradigma	17
3.1.9. Ringkasan Komponen Penting Akademi Paradigma	17
3.2. Modalitas Lokal Penguatan Kepemimpinan Perempuan	18
3.2.1. Mandat Regulasi dan Kebijakan	18
3.2.2. Berbagai Program Pemberdayaan Perempuan di Desa	22
3.2.3. Organisasi Perempuan di Desa	25
3.2.4. Dukungan Pemerintah Kabupaten dan Desa untuk Akademi Paradigma	29
4. Analisis Pembelajaran Akademi Paradigma	31
4.1. Motivasi Peserta	32
4.1.1. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi	32
4.1.2. Kebanggaan Personal dan Peningkatan Pengetahuan.....	32
4.2. Struktur Pelaksanaan	33
4.3. Metode dan Modul Pelatihan	34
4.4. Dukungan Pemerintah	35
4.5. Tantangan Pelaksanaan Akademi Paradigma	36

5. Kesimpulan dan Rekomendasi	39
5.1. Kesimpulan	40
5.1.1. Perbedaan Akademi Paradigta dengan pelatihan sejenis lainnya	40
5.1.2. Motivasi dukungan pemerintah kabupaten dan desa.....	41
5.1.3. Kerangka hukum pelaksanaan pengembangan kepemimpinan perempuan	42
5.1.4. Pendekatan dan komponen kunci penguatan kepemimpinan perempuan di desa	42
5.2. Rekomendasi	44
5.2.1. Organisasi pelaksana	44
5.2.2. Pembentukan mentor dari warga desa setempat	45
5.2.3. Adopsi metode dan modul	45
5.2.4. Optimalisasi kolaborasi dengan organisasi perempuan.....	46
5.2.5. Pembiayaan dari pemerintah desa dan kabupaten	46
Daftar Pustaka.....	47
Lampiran 1. Uraian Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Akademi Paradigta	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kelompok Responden Pendokumentasian Akademi Paradigta.....	7
Tabel 2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	8
Tabel 3. Modul Pelatihan Akademi Paradigta.....	14
Tabel 4. Regulasi dan Kebijakan terkait Pemberdayaan dan Kepemimpinan Perempuan di Desa	20
Tabel 5. Modul Pendidikan Adil Gender dari KAPAL Perempuan	24
Tabel 6. Perbandingan Organisasi Perempuan	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Pelaksana Akademi Paradigta.....	11
---	----

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APB Desa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
DFAT	: Department of Foreign Affairs and Trade
Dinas PMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DP3AKB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
GOW	: Gerakan Organisasi Wanita
Kemendesa PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KLIK	: Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi
Komnas	: Komisi Nasional
KOMPAK	: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Musrenbangdes	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
NU	: Nahdlatul Ulama
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAG	: Pendidikan Adil Gender
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
Pekka	: Perempuan Kepala Keluarga
Pemda	: Pemerintah Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permendes PDTT	: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PPK	: Program Pengembangan Kecamatan
PPRG	: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PPSW	: Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita
PUG	: Pengarusutamaan Gender
RKP Desa	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJM Desa	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RW	: Rukun Warga

SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE	: Surat Edaran
Seknas	: Sekretariat Nasional
SOP	: <i>Standard Operational Procedure</i>
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kepemimpinan perempuan di Indonesia saat ini telah memiliki dasar dalam arahan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun melalui regulasi yang ada. Visi Pembangunan Indonesia untuk tahun 2005–2025, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, dengan tiga kata kunci utama yakni: struktur perekonomian yang kokoh, keunggulan kompetitif wilayah, dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Mandat dan amanat undang-undang tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 di mana salah satu prioritasnya yakni meningkatkan kualitas SDM yang ditandai dengan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, target *Sustainable Development Goals* (SDGs) kelima bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, termasuk “menjamin partisipasi penuh dan efektif, serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat” (Poin 5.5).¹ Agenda pencapaian SDGs ini telah menjadi prioritas pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Keberpihakan terhadap kepemimpinan perempuan telah tercakup dalam berbagai aturan perundangan di tingkat nasional. Pasal keempat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menegaskan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa adalah “mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama”, di mana perempuan merupakan salah satu unsur masyarakat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP No.43/2014) memperkuat dengan mewajibkan pembangunan desa untuk memberikan prioritas salah satunya untuk kepentingan perempuan; serta melibatkan mereka dalam rangkaian proses perencanaan dan penganggaran desa seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Keterwakilan perempuan juga dijamin termasuk dalam Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di tingkat desa masih rendah. Pada 2017, persentase kepala desa perempuan baru mencapai lima persen dari 78.000 desa di seluruh Indonesia (Kemen PPPA, 2017: viii). Di wilayah kerja program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan),² hanya sembilan persen dari 814 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah perempuan, dan hanya 11 dari 514 kepala desa adalah perempuan (KOMPAK 2018). Data tersebut mengindikasikan bahwa mandat peraturan perundangan belum sepenuhnya tercapai dan masih diperlukan banyak upaya untuk terus meningkatkan kepemimpinan perempuan di desa.

¹ Paparan Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/ Bappenas, tentang Strategi Pemerintah untuk Mencapai Tujuan SDGs 5.5 dan Memastikan Keterwakilan Perempuan di Semua Level Pengambilan Kebijakan, 23 Januari 2019.

² KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) adalah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan. KOMPAK memulai kegiatannya pada Januari 2015 dan dilanjutkan hingga 2022. KOMPAK bekerja di tiap tingkat pemerintahan untuk mencari solusi dalam rangka menjawab berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di tujuh provinsi. Informasi lebih lengkap tentang KOMPAK dapat dilihat pada www.kompak.or.id.

Strategi KOMPAK untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan adalah melalui rangkaian kegiatan penguatan kapasitas dan jaringan kelompok perempuan dan masyarakat lainnya, agar dapat berpartisipasi dan memengaruhi proses pembangunan di masyarakat, sekaligus berkolaborasi dengan pemerintah desa. Misalnya melalui mobilisasi dan pelatihan kader perempuan untuk terlibat dalam perencanaan pemerintah desa, serta meningkatkan representasi komunitas termasuk dalam lembaga-lembaga desa. Hal ini selaras dengan komitmen KOMPAK untuk peningkatan tata kelola desa yang setara dan inklusif.

Pada akhir 2015, KOMPAK memulai kemitraan strategis dengan kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA),³ untuk melaksanakan Akademi Paradigta (2016–2020) yang bertujuan untuk memperkuat kader perempuan dan keterlibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Akademi Paradigta adalah bagian dari inisiatif PEKKA dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta meningkatkan kepemimpinan perempuan. Kemitraan ini memperkuat upaya pengembangan kepemimpinan perempuan di tingkat desa guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di desa. Penguatan kapasitas ini juga berlaku untuk kader PEKKA yang sebelumnya masih terbatas keterlibatannya dalam pembangunan desa. Akademi Paradigta mengajarkan kepada perempuan kepala keluarga dan pemimpin perempuan di desa tentang pembangunan desa, sekaligus membantu mereka untuk mempraktikkan keterampilan advokasi dalam mendorong prioritas mereka di dalam forum-forum pengambilan keputusan di desa.

Hasil dari kemitraan ini—yang didukung oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa—saat ini mulai terlihat. Sampai tahun 2020, Akademi Paradigta telah meluluskan 3.450 alumni yang tersebar di 416 desa di 27 kabupaten di tujuh provinsi di Indonesia⁴. Hasil kemitraan ini menunjukkan bahwa para kader semakin percaya diri untuk mengemukakan pendapat dalam forum-forum desa dan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal. Beberapa alumni Akademi Paradigta kemudian menjadi pemimpin atau anggota di kelembagaan masyarakat, pemerintahan desa, dan BPD. Dalam perjalanannya, PEKKA juga menerapkan model Akademi Paradigta dalam wilayah kerjanya di luar area KOMPAK, seperti yang dilakukan dalam kemitraannya pada Program MAMPU⁵. Oleh karena itu, KOMPAK menilai Akademi Paradigta dapat menjadi contoh penting untuk keberhasilan peningkatan kepemimpinan perempuan di desa; sehingga kegiatan dokumentasi perlu dilakukan. Pendokumentasian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap rencana pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan perempuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional, daerah, dan desa.

³ PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) digagas pada akhir 2000 oleh Komnas Perempuan dengan maksud mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik yaitu Provinsi Aceh untuk memperoleh akses sumber daya ekonomi agar dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma mereka, melalui sebuah proyek yang diberi nama “*Widows Project*”. Komnas Perempuan kemudian bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW), membentuk Sekretariat Nasional (Seknas) untuk mengembangkan gagasan awal ini. “*Widows Project*” kemudian ditransformasikan menjadi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disebut PEKKA. PEKKA memulai kegiatan pada pertengahan 2001, dan kelompok perempuan kepala keluarga (Kelompok PEKKA) pertama terbentuk pada awal tahun 2002 di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Informasi lebih lengkap terkait PEKKA dapat dilihat pada www.pekka.or.id.

⁴ Wawancara dengan Direktur PEKKA, September 2020

⁵ Akademi Paradigta awalnya dikembangkan dan didesain dengan dukungan KOMPAK, kemudian diperluas oleh PEKKA di lokasi dukungan kemitraan PEKKA dengan Program MAMPU. MAMPU adalah kemitraan Pemerintah Australia (DFAT) dan Pemerintah Indonesia (BAPPENAS), yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin Indonesia terhadap layanan penting dan program pemerintah, dan mendukung pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait. Bagi Program MAMPU, pemberdayaan perempuan adalah tujuan sekaligus cara untuk mencapai tujuan tersebut. Informasi lebih lengkap terkait MAMPU dapat dilihat pada www.mampu.or.id.

1.2. TUJUAN

Pendokumentasian Akademi Paradigta bertujuan untuk mengidentifikasi model pemberdayaan perempuan yang efektif untuk membangun kepemimpinan perempuan dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam skala luas. Model ini didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran dari pelaksanaan Akademi Paradigta, termasuk modalitas yang dimiliki oleh pemerintah terutama pemerintah kabupaten dan desa. Dalam pendokumentasian ini dilakukan analisis terhadap: (i) model dan pendekatan Akademi Paradigta dan pemberdayaan perempuan lainnya di tingkat desa; (ii) dukungan pemerintah daerah khususnya pemerintah desa dalam pelaksanaan pelatihan Akademi Paradigta; dan (iii) modalitas pelaksanaan pemberdayaan perempuan di tingkat desa.

Secara lebih spesifik, pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam pendokumentasian Akademi Paradigta ini adalah:

1. Bagaimana PEKKA memfasilitasi pelaksanaan Akademi Paradigta dan pendekatan apa yang berbeda dari pelatihan penguatan kepemimpinan perempuan lainnya? Apa insentif dan motivasi bagi kader perempuan PEKKA untuk terlibat dalam program pelatihan kepemimpinan perempuan lokal?
2. Mengapa pemerintah daerah (terutama di tingkat desa) tertarik, memerhatikan, dan memberikan dukungan terhadap pendekatan PEKKA dalam melaksanakan pelatihan kepemimpinan perempuan lokal? Apa bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pelatihan kepemimpinan perempuan PEKKA (dana, tempat penyelenggaraan, kebijakan), dan dari mana sumber daya ini berasal (APB Desa atau sumber lain)?
3. Modalitas apa yang dimiliki oleh desa yang memungkinkan terjadinya pelatihan kepemimpinan perempuan di desa-desa?
4. Berdasarkan pelaksanaan Akademi Paradigta, apa pendekatan dan komponen kunci yang perlu ada dalam penguatan kepemimpinan perempuan di desa?

Akademi Paradigta dipilih sebagai fokus utama pendokumentasian karena akademi tersebut dibangun dari pengalaman panjang pengorganisasian perempuan di desa yang dilakukan oleh PEKKA. Modul dan metode Akademi Paradigta dikembangkan berdasarkan pengalaman perempuan desa dalam berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun organisasi nonpemerintah di desa. Akademi Paradigta merupakan pelatihan kepemimpinan perempuan di desa yang menggabungkan kegiatan pelatihan dalam kelas—yang dipandu dan difasilitasi oleh para mentor dan narasumber—dan penerapan pengetahuan yang diperoleh pesertanya di masyarakat.

Akademi Paradigta merupakan pelatihan kepemimpinan perempuan di desa yang menggabungkan kegiatan pelatihan dalam kelas -yang dipandu dan difasilitasi oleh para mentor dan narasumber, dan penerapan pengetahuan yang diperoleh pesertanya dalam kehidupan nyata di masyarakat. Diharapkan peserta dapat menerapkan pengetahuannya dalam mengatasi persoalan nyata dan mendesak di wilayahnya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari isu perkawinan anak, sampai masalah pengelolaan sampah, dan masalah lainnya. Pendokumentasian pelaksanaan Akademi Paradigta akan menjadi pintu masuk dalam melakukan keseluruhan analisis, mengingat Akademi Paradigta memiliki pengalaman yang kaya dan relevan terhadap keempat aspek yang akan dianalisis sebagaimana telah disebutkan di atas.



METODOLOGI

2.1. BATASAN PENGERTIAN PEMBERDAYAAN DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pendokumentasian Akademi Paradigta dimaksudkan untuk mengidentifikasi model pemberdayaan perempuan, di mana tujuan Akademi sendiri adalah mengembangkan kepemimpinan perempuan.⁶ Dalam kegiatan dokumentasi ini, yang dimaksud pemberdayaan perempuan adalah seperti yang didefinisikan oleh Prijono dan Pranaka (2010) yaitu suatu proses membangun kesadaran dan penguatan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki (Muchlisin, Riadi 1996). Selain itu Zakiyah (2010) menyebutkan, pemberdayaan perempuan harus berada pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar, dan negara (Muchlisin, Riadi 1996).

Akademi Paradigta dirancang sebagai suatu proses pendidikan untuk mendukung kader PEKKA dan pemimpin perempuan lainnya di pedesaan dan pinggiran kota, yang lahir dari proses pemberdayaan PEKKA dan inisiatif lainnya untuk masuk ke dalam sistem yang lebih luas di tingkat desa hingga tingkat yang lebih tinggi (PEKKA, 2017). Secara umum, PEKKA memahami kepemimpinan perempuan sebagai kemampuan untuk memengaruhi keputusan dari rumah tangga sampai negara, dan terlibat aktif dalam proses memutuskan dan membangun kehidupan masyarakat (Direktur PEKKA, Agustus 2020). Kepemimpinan perempuan dalam keseluruhan proses pelatihan Akademi Paradigta menitikberatkan pada peningkatan kemampuan perempuan untuk berpikir kritis dan menjadi penggerak di komunitasnya. Sejalan dengan lingkup kerja KOMPAK yang fokus pada tata kelola pemerintahan, dua komponen kemampuan tersebut dalam laporan ini digunakan untuk memahami kepemimpinan perempuan sebagai hasil dari pelaksanaan Akademi Paradigta, dengan fokus pada peran mereka di tingkat komunitas, kelompok atau organisasinya, termasuk organisasi sosial di desa, dan juga di pemerintahan.

2.2. METODE PENGAMBILAN DATA

Pendokumentasian Akademi Paradigta dilakukan melalui pengumpulan data secara kualitatif melalui diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) dan wawancara. Pendokumentasian berupaya mencatat pengalaman, kegiatan pemberdayaan perempuan yang berbeda dan praktik baik, antara wilayah dampingan organisasi PEKKA (desa PEKKA) dan nonwilayah dampingan PEKKA (desa non-PEKKA) di wilayah kerja KOMPAK.

Kriteria umum dalam pemilihan lokasi pendokumentasian adalah desa di mana PEKKA telah bekerja, memiliki contoh pengalaman atau praktik baik dalam penyelenggaraan Akademi Paradigta, termasuk adanya dukungan dari pemerintah desa (penyelenggaraan Akademi Paradigta dan dana). Pemilihan desa PEKKA dan desa non-PEKKA dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari organisasi PEKKA berdasarkan pertimbangan kriteria-kriteria tersebut.

⁶ PEKKA. Tanpa Tahun. Modul 1. Mengawali Pendidikan Paradigta

Pendokumentasian dilakukan di delapan desa, yaitu empat desa PEKKA dan empat desa non-PEKKA yang tersebar di empat kabupaten yaitu Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat, NTB), serta Kabupaten Brebes (Jawa Tengah). Wawancara dan FGD dilakukan terhadap total 141 narasumber (33 laki-laki dan 108 perempuan) mencakup kader PEKKA, aktivis lokal, pejabat pemerintah kabupaten, kepala desa dan aparat desa, bidan desa, organisasi perempuan di tingkat lokal, dan masyarakat umum di wilayah pendokumentasian.

Sebelum studi dilaksanakan, telah dilakukan rangkaian kegiatan yakni studi pendahuluan yang mencakup kajian literatur (dokumen kebijakan dan panduan pelaksanaan Akademi Paradigta serta pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh berbagai organisasi perempuan), kunjungan lapangan⁷, dan dialog dengan Direktur Perlindungan Sosial beserta tim kerjanya di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), untuk memahami dinamika kepemimpinan perempuan di desa.

TABEL 1. KELOMPOK RESPONDEN PENDOKUMENTASIAN AKADEMI PARADIGTA

KATEGORI RESPONDEN	JAWA TENGAH			NUSA TENGGARA BARAT		
	TOTAL	P	L	TOTAL	P	L
Pemerintah Daerah	3	2	1	13	7	6
Perangkat Desa	4	0	4	17	2	15
Pengurus PKK	11	11	0	7	7	0
Kader, Alumni, dan Mentor PEKKA	22	22	0	9	9	0
Organisasi Perempuan	3	3	0	21	21	0
Pendamping Desa	4	3	1	1	0	1
Kelompok lainnya	4	3	1	5	1	4
TOTAL:	51	44	7	73	47	26

Catatan:

Informasi yang didapatkan dari wawancara dan diskusi terarah di Jawa Tengah tidak sebanyak informasi yang didapatkan dari Nusa Tenggara Barat. Sehingga, banyak pembahasan temuan yang dituliskan dalam laporan ini, lebih banyak merujuk kepada data dan informasi yang didapatkan dari Nusa Tenggara Barat.

⁷ Dengan tujuan untuk mengetahui konteks kewilayahan dan program kepemimpinan perempuan secara garis besar, dilakukan kunjungan lapangan dan wawancara dengan pihak yang relevan di wilayah NTB

2.3. WAKTU PELAKSANAAN PENDOKUMENTASIAN

Pelaksanaan pendokumentasian Akademi Paradigta dilaksanakan selama bulan Juli–Desember 2019, yang kemudian diteruskan sampai penulisan laporan pada Juli–Agustus 2020. Rincian waktu pelaksanaan rangkaian kegiatan pendokumentasian tersebut ialah sebagai berikut:

TABEL 2. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

NO.	KEGIATAN	PERIODE
1	Studi pendahuluan	Juli–September 2019
2	Penggalian data di lapangan (wawancara dan FGD)	Oktober 2019
3	Analisis dan penulisan draf laporan	November–Desember 2019
4	Finalisasi laporan pendokumentasian	Juli–Agustus 2020



3

AKADEMI PARADIGTA DAN MODALITAS LOKAL PENGUATAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

3.1. AKADEMI PARADIGTA

3.1.1. TUJUAN AKADEMI PARADIGTA

Pengembangan Akademi Paradigta secara umum bertujuan untuk pengembangan kepemimpinan perempuan di akar rumput guna membangun kehidupan yang sejahtera, adil, demokratis, inklusif, dan berdaulat.

Secara khusus Akademi Paradigta bertujuan untuk:⁸

1. Mengembangkan potensi kepemimpinan perempuan agar dapat terlibat aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayahnya;
2. Mengembangkan kurikulum, materi, modul, dan manual pendidikan kepemimpinan perempuan; dan
3. Mengembangkan kelembagaan sebagai arena belajar bagi lintas generasi, kelas, dan bangsa tentang pemberdayaan masyarakat dan kepemimpinan perempuan.

3.1.2. STRUKTUR PELAKSANAAN AKADEMI PARADIGTA

Akademi Paradigta merupakan salah satu dari berbagai kegiatan Program PEKKA (seperti pendidikan hukum, pemberdayaan ekonomi, klinik layanan informasi dan konsultasi, dan lainnya) di berbagai desa di Indonesia. Secara khusus, PEKKA menunjuk koordinator proyek untuk mengelola Program Akademi Paradigta. Pelaksanaan Akademi Paradigta menggunakan struktur organisasi Sekretariat Nasional PEKKA dan Organisasi Serikat Pekka yang saat ini sudah ada dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional. Sekretariat Nasional PEKKA menunjuk dan menugaskan koordinator di tingkat nasional dan wilayah untuk menerima penugasan khusus dalam pelaksanaan Akademi Paradigta. Mereka telah mengenal secara dekat para mitra PEKKA dan pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan Akademi Paradigta di tingkat daerah dan desa.

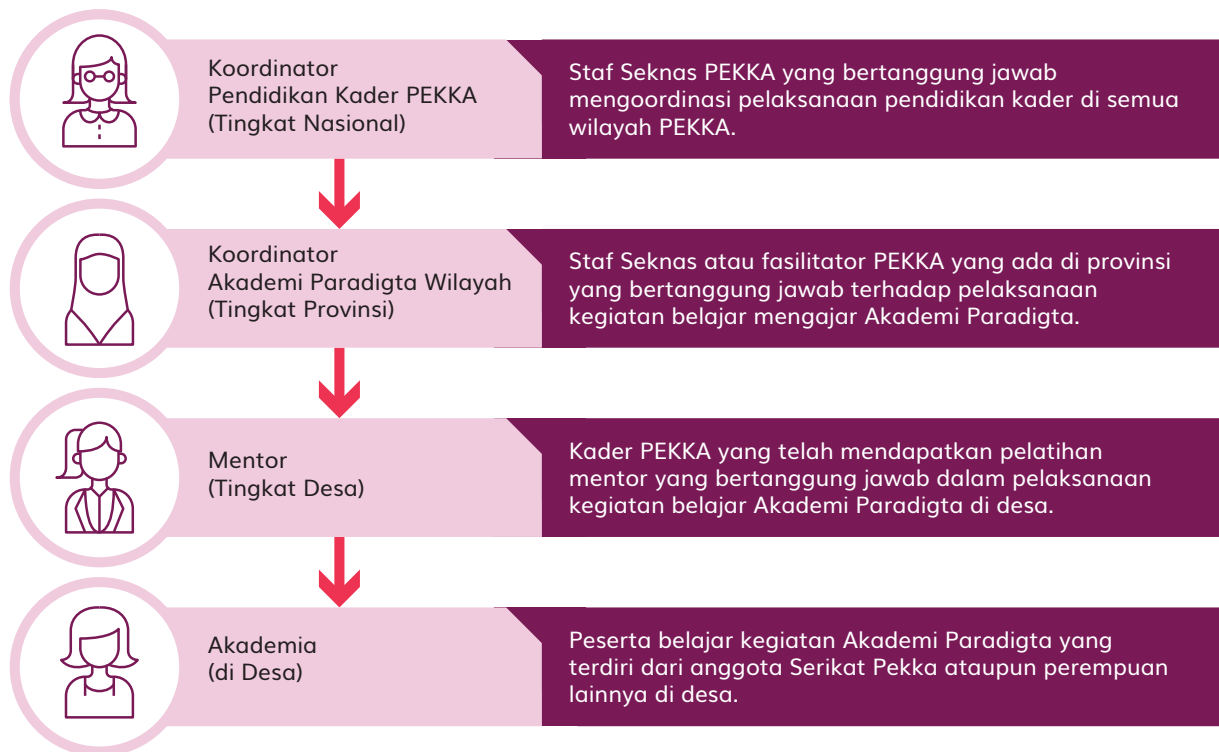
Sedangkan para kader PEKKA di desa yang memenuhi syarat sesuai dengan *standard operational procedure* (SOP) Akademi Paradigta, ditugaskan menjadi mentor.⁹ Adapun untuk wilayah di mana PEKKA belum pernah bekerja, maka PEKKA terlebih dahulu melakukan pengorganisasian perempuan melalui pembentukan Serikat Pekka. Selain membentuk Serikat Pekka di wilayah baru, PEKKA dapat bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal yang telah melakukan pengorganisasian perempuan, dan telah membentuk kelompok perempuan di desa, untuk kemudian melaksanakan pelatihan Akademi Paradigta, sebagaimana terjadi di Ambon.¹⁰

⁸ <https://pekka.or.id/akademi-paradigta/>. Diakses pada 10 Juli 2020. Penjelasan ini juga dituangkan dalam PEKKA. Tanpa tahun. Modul 1. Mengawali Pendidikan Paradigta

⁹ Sesuai dengan SOP PEKKA, syarat untuk menjadi mentor adalah (i) telah aktif menjadi anggota PEKKA minimal tiga tahun; (ii) mengikuti pelatihan menjadi mentor pendidikan kader PEKKA; (iii) bisa baca tulis; (iv) memahami Bahasa Indonesia; (v) bersedia menjadi mentor minimal satu tahun dengan menandatangani form kesediaan.

¹⁰ Wawancara dengan Direktur PEKKA, September 2020

GAMBAR 1. STRUKTUR PELAKSANA AKADEMI PARADIGTA



Keberadaan organisasi atau kelompok perempuan di desa menjadi salah satu persyaratan pelaksanaan Akademi Paradigta. Karena konsep akademi adalah memberikan ruang bagi peserta untuk melakukan aksi langsung di masyarakat, maka akan sulit dilakukan tanpa adanya organisasi/kelompok perempuan. Oleh karena itu, apabila akademi akan dilakukan di wilayah desa baru, diperlukan pengorganisasian pembentukan Serikat Pekka, atau melalui organisasi/kelompok perempuan yang sudah difasilitasi oleh LSM lain, atau organisasi yang sudah ada di desa seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Proses pengorganisasian—termasuk melalui organisasi perempuan yang sudah ada di desa seperti PKK—membutuhkan waktu minimal satu tahun untuk memperkuat organisasi tersebut. Sehingga, ketika pelatihan akademi dilaksanakan, peserta dapat secara langsung melakukan aksinya bersama dengan organisasi tersebut.¹¹

Mentor yang ditunjuk dari kader PEKKA tidak bekerja sendirian, karena di tingkat kabupaten, Serikat Pekka membentuk tim mentor yang terdiri dari cukup banyak kader yang terpilih dan terlatih.¹² Tim mentor tersebut akan membagi tugas di antara mereka untuk memfasilitasi pelaksanaan kelas pembelajaran Akademi Paradigta. Setiap kelas pembelajaran membutuhkan tiga sampai empat mentor untuk berbagi peran, yaitu sebagai pelatih, panitia yang mengelola urusan administrasi, serta urusan logistik. Supaya lebih efisien, pelaksanaan kelas Akademi Paradigta dilakukan dengan mengumpulkan peserta dari desa-desa yang berdekatan lokasinya. Misalnya, apabila terdapat tiga desa yang berdekatan, sesi pembelajaran dilakukan bersama-sama untuk seluruh peserta dari tiga desa tersebut.

¹¹ Wawancara dengan Direktur PEKKA, September 2020

¹² Pelatihan untuk tim mentor menggunakan modul yang sama dengan peserta, akan tetapi dalam pelatihan mentor, mereka ditugaskan untuk menyusun rencana fasilitasi setiap modul dan kemudian langsung mempraktikkannya dalam sesi pelatihan di kelas. Sehingga, ketika mereka memfasilitasi pelatihan untuk peserta, mereka sudah paham dan berpengalaman bagaimana prosesnya dilakukan.

Mentor adalah aktor kunci untuk implementasi Akademi Paradigta, sebagai penanggung jawab sosialisasi, administrasi, serta implementasi akademi di desa. Para mentor ini, memperkenalkan dan mensosialisasikan akademi kepada kepala desa, pemimpin lokal, dan penduduk desa. Mentor menjelaskan organisasi PEKKA, kegiatan PEKKA termasuk Akademi Paradigta dan Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi (KLIK) PEKKA. Mentor juga menyerahkan surat resmi dari organisasi PEKKA tentang rencana implementasi Akademi Paradigta kepada kepala desa. Mentor juga harus mensosialisasikan program akademi beberapa kali terutama di tahap awal, agar pemerintah dan warga desa memahami tujuannya.

PEKKA memberikan pelatihan intensif selama hampir satu bulan untuk memperkuat kapasitas mentor. Mereka juga mendapatkan pendampingan dari koordinator wilayahnya, terutama ketika mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, termasuk dalam berhubungan dengan pemerintah desa. Mentor mendapatkan honor harian, uang transportasi, dan uang makan sebagai pengganti hari kerja mereka yang besarnya beragam dan disesuaikan dengan ketersediaan dana serta konteks setempat. Keberadaan mentor di tingkat desa dan dukungan koordinator di tingkat wilayah sampai nasional, menjadikan struktur pelaksanaan program efektif untuk dijalankan di tingkat desa, dan memudahkan koordinasi pelaksanaan program sampai di tingkat nasional (Seknas PEKKA). Sehingga keputusan terkait pelaksanaan program dapat dibuat secara lebih cepat dan terstruktur.

3.1.3. PESERTA AKADEMI PARADIGTA

Proses rekrutmen peserta Akademi Paradigta (akademia) secara prosedural dilakukan melalui penjangkauan di tingkat komunitas khususnya anggota Serikat Pekka dan rujukan atau usulan dari pemerintah desa. Serikat Pekka mengusulkan calon peserta dan pemerintah desa juga memberikan rekomendasinya. Di banyak desa, istri kepala desa juga diikutkan sebagai peserta. Hal ini dilakukan karena banyak kepala desa yang menilai pentingnya Akademi Paradigta untuk meningkatkan kapasitas perempuan. Dalam sisi lain, istri kepala desa juga berperan sebagai salah satu tokoh perempuan termasuk menjabat sebagai Ketua PKK desa. Berdasarkan hasil proses penjangkauan dan rujukan/usulan pemerintah desa, seluruh daftar peserta secara resmi ditetapkan oleh kepala desa dan diberikan kepada PEKKA untuk diikutkan dalam pelatihan Akademi Paradigta.

Penetapan peserta Akademi Paradigta oleh kepala desa adalah salah satu strategi yang dilakukan PEKKA, untuk mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari kepala desa kepada peserta yang akan menjadi aset desa. Dengan demikian, pemerintah desa juga bisa mengalokasikan anggaran desa untuk membiayai kebutuhan para akademia. Setelah lulus, alumni diserahkan kembali kepada pemerintah desa dalam acara wisuda, untuk kemudian akan menjadi mitra pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan dan program-programnya. Berdasarkan hasil monitoring PEKKA, rata-rata tingkat kelulusan peserta adalah 80 persen, di mana 20 persen yang tidak lulus karena tidak aktif mengikuti kegiatan atau tidak menyelesaikan tugasnya. Dari jumlah peserta yang lulus, sebanyak 65 persen terlibat aktif dalam kegiatan desa.¹³

¹³ Wawancara dengan Direktur PEKKA, Agustus 2020

3.1.4. METODE PELATIHAN

Metode pelatihan Akademi Paradigta merupakan kombinasi pelatihan kepemimpinan perempuan yang dilaksanakan di dalam kelas (*in-house*) dan praktik langsung melalui partisipasi akademia dalam pertemuan masyarakat di tingkat desa atau kegiatan lainnya. Pelaksanaan diskusi di kelas hanya 25 persen dari seluruh komponen metode pelaksanaan pelatihan, sedangkan selebihnya (75 persen) dialokasikan untuk praktik langsung terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat desa. Pilihan metode tersebut berdasarkan pengalaman PEKKA, di mana pelatihan yang efektif adalah pelatihan yang berorientasi aksi; sehingga porsi aksi (praktik langsung di masyarakat) merupakan komponen terbesar dalam pelatihan Akademi Paradigta.

Pada praktiknya, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan di Akademi Paradigta mencapai enam bulan bahkan delapan bulan, di kelas-kelas yang dikelola oleh kader PEKKA yang ditunjuk sebagai mentor serta didukung oleh beberapa narasumber. Pelaksanaan pelatihan yang memakan waktu 6-8 bulan ini disebabkan karena sesi pelatihan hanya dilaksanakan rata-rata dua kali seminggu (sekitar 4–5 jam setiap pertemuan), sesuai kesepakatan dengan peserta. Sesi atau materi pelatihan terdiri dari topik umum tentang kepemimpinan perempuan (mencakup pemerintahan dan tata kelola desa, layanan publik, dan advokasi kebijakan) dan tema khusus seperti kesehatan reproduksi, perempuan dan tanggap bencana, dan topik lainnya (lihat subbagian 3.1.5).

Sebagai bagian dari proses pelatihan Akademi Paradigta, peserta harus melakukan praktik langsung di masyarakat, misalnya ikut melaksanakan kegiatan KLIK PEKKA, melakukan tinjauan anggaran desa, pendataan dan advokasi terkait layanan sosial dan kekerasan, serta membuat model pengelolaan sampah dan ketahanan pangan, dan lain-lain. Mereka juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan di desa termasuk musyawarah desa untuk merencanakan pembangunan di desa.

Di akhir sesi pelatihan, akademia diminta membuat tulisan akhir yang bisa didasarkan dari pengalaman praktik lapangan di masyarakat, atau membuat inisiatif baru yang menjadi model untuk diusulkan ke pemerintah desa. Misalnya, di Nusa Tenggara Timur terdapat akademia dengan disabilitas netra yang menuliskan (dibantu oleh mentor dan saksi penulisan) tentang rencananya untuk melakukan advokasi pembangunan sarana dan prasarana yang bisa diakses oleh disabilitas netra.¹⁴ Tulisan akhir tersebut menjadi syarat kelulusan akademia sebelum menjalani kegiatan wisuda (Direktur PEKKA, Agustus 2020).

¹⁴ Program Akademi Paradigta memang tidak secara khusus ditargetkan kepada penyandang disabilitas sebagai pesertanya. Akan tetapi, apabila di lapangan ditemukan peserta penyandang disabilitas, mentor akan melakukan penyesuaian metode penyampaian materi dan pendampingan kepada peserta tersebut, sebagaimana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur.

3.1.5. MODUL PELATIHAN

Pelatihan Akademi Paradigta menggunakan modul yang dibuat berdasarkan catatan pengalaman panjang organisasi PEKKA dalam melakukan pengorganisasian perempuan. Modul terdiri dari 10 modul umum terkait pengetahuan penguatan kepemimpinan perempuan dan enam modul tematik. Modul umum adalah modul yang wajib dilaksanakan di seluruh daerah, sedangkan modul tematik dipilih berdasarkan kebutuhan di setiap daerah. Topik modul umum dan tematik didasarkan pada pengalaman pengorganisasian yang sudah dilakukan PEKKA—sesuai dengan arah dan tujuan Akademi Paradigta yang sudah disepakati oleh PEKKA dan KOMPAK—serta masukan dari tim di tingkat nasional yang dibentuk khusus untuk menyusun modul-modul tersebut.¹⁵ Keseluruhan modul yang disampaikan dalam masa pelatihan Akademi Paradigta ialah sebagai berikut:

TABEL 3. MODUL PELATIHAN AKADEMI PARADIGTA

ASPEK	MODUL PEKKA
TUJUAN	Modul Akademi Paradigta Perempuan Hebat untuk Indonesia Berdaulat bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan perempuan di akar rumput guna membangun kehidupan yang sejahtera, adil, demokratis, inklusif, dan berdaulat.
PESERTA	Kader Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan kader perempuan akar rumput lainnya.
WILAYAH	Modul telah digunakan untuk pendidikan Akademi Paradigta sejak angkatan pertama tahun 2016–2020, yang sudah diikuti oleh 3.450 akademika di 7 provinsi (Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara).
RINGKASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Modul 1: Mengawali Pendidikan Paradigta; panduan untuk memulai proses pendidikan Paradigta dalam suasana belajar bersama yang kondusif, efektif, dan menyenangkan. 2) Modul 2: Perempuan Pemimpin; menggali makna kepemimpinan bagi perempuan. Mengajak perempuan untuk menggunakan pengalaman hidupnya sebagai dasar membangun cita-cita hidupnya ke depan, menjadi perempuan memimpin perubahan. 3) Modul 3: Perempuan Memperkuat Kebangsaan Indonesia; membangun pemahaman tentang arti wawasan kebangsaan dan pentingnya untuk memperkuatnya secara terus menerus, menggugah kesadaran kritis tentang realitas keberagaman dan kebhinekaan sebagai dasar persatuan bangsa, dan mendiskusikan berbagai inisiatif yang dapat dilakukan untuk membangun dan memperkuat wawasan kebangsaan dalam masyarakat. 4) Modul 4: Perempuan dan Desa Harapan; mengajak akademika menyadari pentingnya peran perempuan dalam membangun desa, membangun visi serta posisi dirinya dan partisipasi aktif dalam pembangunan desa untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi perempuan dan masyarakat marginal. 5) Modul 5: Perempuan dan Keterlibatan di Desa; proses belajar bersama bagi akademika tentang hal-hal penting dan strategis untuk memperjuangkan hak-hak perempuan terkait pembangunan desa. 6) Modul 6: Perempuan dalam Ranah Tata Kelola Desa; bertujuan agar akademika memahami proses dan ciri-ciri tata pemerintahan yang baik, serta pentingnya peran perempuan terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tata kelola pemerintah desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab.

¹⁵ Metode pelaksanaan modul-modul tersebut akan menyesuaikan dengan metode penyampaian sesi pelatihan yang disusun oleh tim mentor, berdasarkan kebutuhan peserta di masing-masing daerah.

ASPEK	MODUL PEKKA
RINGKASAN	<ol style="list-style-type: none">7) Modul 7: Perempuan dan Pelayanan Publik; membahas tentang pelayanan publik dengan penekanan pada peranan perempuan dalam ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik di daerahnya. Akademi akan belajar tentang akses pelayanan publik, pengawasan, dan advokasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.8) Modul 8: Perempuan Mengorganisasi Desa; melatih akademia menjadi pengorganisir yang efektif dengan praktik langsung di lapangan.9) Modul 9: Advokasi Kebijakan untuk Perubahan Sosial; melatih akademia agar mampu menjadi pelaku dan mengorganisir kerja advokasi kebijakan di wilayahnya masing-masing.10) Modul 10: Perempuan Menulis Perubahan Paling Bermakna untuk Desa Berdaulat; memahami bersama perubahan paling bermakna dan cara menuliskannya; menuliskan pengalaman mereka terkait cerita perubahan paling bermakna dari pengalaman dan kerja perubahan yang dilakukannya; dan pembuatan karya tulis akhir pendidikan Akademi Paradigta.11) Modul Tematik 1: Perempuan dan Hak-hak Reproduksi; Akademi memahami bahwa dirinya mempunyai hak dan kekuasaan dalam mengontrol tubuhnya dan menyadari pentingnya kemampuan mengontrol tubuhnya agar tidak mudah dikuasai oleh orang lain.12) Modul Tematik 2: Perempuan dan Tanggapan Bencana; mendapatkan pengetahuan dan mengenal bentuk-bentuk bencana serta memahami dampaknya bagi perempuan dan anak sebagai korban.13) Modul Tematik 3: Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan; memahami kekerasan terhadap perempuan sebagai persoalan kemanusiaan yang serius dan memberikan dampak luar biasa kepada para korban dan sistem kehidupan.14) Modul Tematik 4: Perempuan dan Kedaulatan Pangan; memahami pentingnya kedaulatan pangan dan termotivasi untuk mengorganisir masyarakat mengembangkan kedaulatan pangan untuk desa berdaulat di wilayahnya.15) Modul Tematik 5: Perempuan dan Kedaulatan Ekonomi; meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan keterampilan akademia terkait kepemimpinan perempuan desa dan ekonomi solidaritas.16) Modul Tematik 6: Perempuan dan Lingkungan Hidup; meningkatkan pemahaman dan peran yang dapat dilakukan akademia sebagai pemimpin perempuan di desa terkait pelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup di wilayahnya.

Sumber: PEKKA, 2017

Catatan:

<https://pekka.or.id/blog/2018/12/18/modul-akademi-paradigta/>. Diakses 1 September 2020. Serta tambahan informasi jumlah peserta terbaru sampai tahun 2020 berdasarkan wawancara dengan Direktur PEKKA, September 2020.

3.1.6. TEMPAT DAN WAKTU PELATIHAN

Pelatihan Akademi Paradigta dilaksanakan, sebagian besar, di kantor desa atau di Center PEKKA¹⁶ 1 (jika ada). Untuk wilayah PEKKA yang telah memiliki Center PEKKA, seperti desa-desa di Kabupaten Lombok Barat, pelatihan Akademi Paradigta dilaksanakan di tempat tersebut. Sedangkan untuk desa-desa yang belum memiliki Center PEKKA, seperti di beberapa desa di Kabupaten Brebes dan Lombok Timur, maka pelatihan diselenggarakan di kantor desa. Belum semua kantor desa mau memberikan peminjaman ruangan untuk pelatihan Akademi Paradigta secara gratis atau tanpa biaya. Bahkan, di salah satu desa, PEKKA perlu membayar biaya tambahan seperti alat pengeras suara ketika memanfaatkan ruangan di kantor desa untuk keperluan pelatihan Akademi Paradigta.

Pelatihan diawali dengan membuat kesepakatan belajar antara mentor dan akademia. Kesepakatan ini mencakup penentuan frekuensi pertemuan, pemilihan hari, waktu per sesi, dan kebutuhan peserta lainnya seperti membawa anaknya saat mengikuti pelatihan. Dalam hal ini, tim mentor membagi perannya, di mana sebagian akan menjadi pengajar dan sebagian menjadi panitia pelaksana, termasuk menjaga anak-anak peserta.

Secara umum, pelatihan Akademi Paradigta dilakukan dalam waktu 6–8 bulan, yang biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu selama masing-masing 4–5 jam per hari, sesuai dengan kesepakatan. Namun, ada juga sebagian desa yang menyepakati untuk melakukan pertemuan lima hari dalam seminggu, karena mereka ingin cepat selesai. Penentuan waktu kegiatan ini sepenuhnya didasarkan pada kesepakatan bersama dengan peserta, sesuai ketersediaan waktu peserta untuk mengikuti pelatihan.

3.1.7. WISUDA PESERTA AKADEMI PARADIGTA

“Suami saya setelah melihat foto wisuda saya, tidak melarang-larang lagi untuk beraktivitas di luar rumah,” ungkap seorang alumni dari Kabupaten Lombok Timur.

Setelah selesai mengikuti pelatihan, para akademia dilantik secara resmi di hadapan banyak pemangku kepentingan daerah. Wisuda ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan program dan para alumni Akademi Paradigta kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, khususnya di tingkat kabupaten dan provinsi, sehingga bisa membentuk jejaring komunikasi dan kerja sama di masa mendatang. Wisuda kerap dilaksanakan di gedung milik pemerintahan provinsi, kabupaten, desa atau Center PEKKA dengan mengundang kepala desa, aparat desa, dan dinas terkait dari kabupaten dan/atau provinsi. Saat wisuda, secara resmi PEKKA menyerahkan kembali peserta yang sudah lulus kepada pemerintah desa untuk menjadi kader desa yang bisa membantu pemerintah desa.¹⁷

¹⁶ Center PEKKA adalah istilah yang digunakan oleh PEKKA untuk menjelaskan tempat berkumpul dan pelaksanaan kegiatan serikat atau kelompok PEKKA yang ada di desa.

¹⁷ Pada awal pelaksanaan Akademi Paradigta, kepala desa menetapkan peserta akademi untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh PEKKA. Oleh karena itu, ketika wisuda kelulusan, peserta dikembalikan kepada pemerintah desa untuk menjadi kader desa.

Wisuda diselenggarakan dengan seremonial layaknya wisuda dalam dunia akademis formal, sehingga menjadi peristiwa prestisius dan apresiasi bagi para alumni. Peserta yang sudah berhasil menyelesaikan seluruh proses pembelajaran akan mendapatkan sertifikat kelulusan dari PEKKA. Keduanya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri para alumni untuk lebih berdaya lagi, dan juga sebagai upaya meningkatkan daya tawar tidak hanya dalam relasinya dengan pasangan maupun keluarga, tetapi juga terhadap masyarakat di lingkungannya dan pemerintah desa setempat.

3.1.8. PENDANAAN AKADEMI PARADIGTA

Pada tahun pertama pelaksanaan, Akademi Paradigta didanai seluruhnya oleh Sekretariat Nasional PEKKA dengan dukungan KOMPAK. Untuk tahun kedua dan seterusnya, sebagian pendanaan berasal dari pemerintah kabupaten dan desa. Pembiayaan ini meliputi kebutuhan operasional yaitu biaya persiapan dan rekrutmen peserta Akademi Paradigta dan biaya pelaksanaan pelatihan. Komponen biaya persiapan seperti sosialisasi Akademi Paradigta ke komunitas dan pemerintah desa terdiri dari biaya transportasi mentor dan kader PEKKA, serta pembentukan Serikat Pekka untuk wilayah baru PEKKA. Sementara pada saat pelaksanaan, komponen biaya yang dibutuhkan adalah biaya transportasi mentor dan akademia, serta alat tulis (Direktur PEKKA, Agustus 2020).

Di Lombok Timur (NTB), sebagian pemerintah desa mendanai transportasi setiap akademia sebesar Rp1.000.000,- yang umumnya dialokasikan untuk 10–15 orang peserta. Alokasi dana tersebut dimasukkan dalam alokasi kegiatan pemberdayaan perempuan yang ada di perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Seluruh dana dari desa dikelola oleh PEKKA dan digunakan untuk mengganti ongkos transportasi dan pemenuhan kebutuhan peserta. Umumnya, desa yang memberikan dukungan dana berupa transportasi juga meminjamkan ruang untuk pelatihan Akademi Paradigta sekaligus perangkat pengeras suara jika diperlukan.

Dana Desa yang dialokasikan untuk Akademi Paradigta umumnya digunakan untuk transportasi dan alat tulis bagi seluruh 44 sesi atau biaya harian peserta. Biaya mentor tidak ditanggung oleh Dana Desa, karena dalam Surat Keputusan Kepala Desa, pembiayaan untuk mentor tidak termasuk yang ditanggung oleh desa. Guna membiayai kebutuhan dana untuk mentor, Seknas PEKKA telah mengubah strategi dengan mengurangi alokasi biaya untuk tunjangan transportasi dan alat tulis peserta, sehingga kelebihannya bisa digunakan untuk membiayai mentor. Cara lain untuk membiayai mentor adalah dengan menggunakan sebagian dana dari pos lain, seperti konsumsi dan sewa tempat. Para mentor juga mengharapkan bahwa dalam waktu dekat, desa-desa akan mendanai peserta dan mentor secara keseluruhan. Di sebagian kabupaten yang mereplikasi pelaksanaan Akademi Paradigta, seperti di Kabupaten Kubu Raya, mentor mendapatkan alokasi pendanaan dari pemerintah kabupaten (Direktur PEKKA, September 2020).

3.1.9. RINGKASAN KOMPONEN PENTING AKADEMI PARADIGTA

Secara ringkas, pelaksanaan Akademi Paradigta membutuhkan tiga komponen utama, yaitu: **(i) peran mentor, (ii) dukungan pemerintah desa, dan (iii) komitmen akademia untuk melakukan aksi langsung di masyarakat melalui organisasi/kelompok perempuan.** Peran mentor penting untuk mengelola pelaksanaan akademi di tingkat desa. Sementara itu, dukungan dari pemerintah desa yang berupa penetapan peserta, alokasi pendanaan untuk peserta, dan ruang-ruang untuk kegiatan pelatihan kader PEKKA menjadi pendukung keberhasilan pelaksanaan akademi. Tanpa adanya ketetapan peserta oleh Kepala Desa, peserta akan sulit mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah desa.

Para peserta juga secara aktif melakukan berbagai kegiatan bersama masyarakat melalui Serikat Pekka atau organisasi perempuan yang ada di desa, termasuk dalam kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Mereka terlibat dalam banyak kegiatan PEKKA di desa, membuat model upaya-upaya pembangunan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi perempuan di desa, dan juga melakukan advokasi untuk layanan dan akses keadilan bagi perempuan desa. Melalui jaringan PEKKA, para alumni akademi juga dapat mengikuti berbagai pertemuan yang dilakukan di tingkat desa dan kabupaten, bahkan sebagian alumni sudah menjadi anggota atau menjabat di BPD. Mereka juga dapat mengakses sumber daya dan informasi yang dimiliki PEKKA untuk advokasi di daerah, serta memperoleh bantuan dari fasilitator PEKKA¹⁸ di wilayah tersebut, terutama ketika menghadapi tantangan tertentu.

3.2. MODALITAS LOKAL PENGUATAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Modalitas untuk pelaksanaan penguatan kepemimpinan perempuan di desa, termasuk untuk melakukan replikasi program Akademi Paradigta atau program lain sejenis, dikategorikan menjadi empat, yaitu (a) mandat regulasi dan kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaannya, (b) program pemberdayaan perempuan yang sudah ada, (c) organisasi perempuan yang ada di desa, dan (d) dukungan dari pemerintah kabupaten dan desa. Penjelasan masing-masing modalitas tersebut ialah sebagai berikut:

3.2.1. MANDAT REGULASI DAN KEBIJAKAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), memberikan mandat kepada desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk perempuan di desa. Pemberdayaan adalah salah satu asas pengaturan desa (Pasal 3) dan pemberdayaan masyarakat desa juga merupakan salah satu kewenangan desa (Pasal 18), yang juga menjadi tugas Kepala Desa (Pasal 26). Bahkan UU Desa juga secara tegas menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari kewajiban desa (Pasal 67). Secara khusus, untuk mendorong kepemimpinan perempuan, UU Desa menyebutkan bahwa kelompok perempuan harus diikutsertakan dalam musyawarah desa yang menjadi bagian dari unsur masyarakat (penjelasan Pasal 54) dan anggota BPD harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan (Pasal 58).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai pelaksana dari UU Desa juga menegaskan keterwakilan perempuan dalam musyawarah desa¹⁹ dan keanggotaan BPD. Di samping itu, peraturan tersebut juga secara tegas menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa harus mempertimbangkan keadilan gender (Pasal 121). Pada tahapan perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa juga harus menunjukkan bahwa rencana kegiatan dan anggaran desa sudah berpihak kepada kepentingan perempuan (Pasal 127).

¹⁸ Fasilitator PEKKA adalah struktur yang ada dalam organisasi PEKKA di luar pelaksana program Akademi Paradigta. Fasilitator tersebut menjalankan program PEKKA lainnya, tetapi dapat ditugaskan untuk membantu alumni Akademi Paradigta yang ada di wilayah kerjanya.

¹⁹ Keikutsertaan perempuan dalam musyawarah desa juga ditegaskan kembali dalam Permendesa PDPT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa dalam Pasal 5.

Secara teknis, untuk memastikan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang berpihak pada perempuan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengamanatkan bahwa bagian dari tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa harus mengikutsertakan perempuan (Pasal 8 dan 33). Tidak hanya pada tahapan perencanaan, keterlibatan perempuan juga harus dipastikan sebagai bagian dari pelaksana kegiatan desa (Pasal 40). Dengan demikian, perwakilan perempuan dapat terlibat aktif dalam rangkaian pembangunan di desa.

Secara khusus, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa salah satu sub dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa (salah satu dari empat bidang pembangunan desa) adalah pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga (Pasal 17). Peraturan tersebut juga sudah menyebutkan secara jelas bahwa salah satu kegiatan dalam subbidang tersebut adalah pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan, dengan kode rekening 4.4.01. Dalam format rencana kerja kegiatan desa, jumlah sasaran perempuan juga harus disebutkan secara eksplisit dalam tabelnya (Lampiran dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Artinya, sejak tahun 2019 pemerintah desa sudah memiliki kode rekening khusus untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai pelatihan/penyuluhan terkait pemberdayaan perempuan di desa.

Dalam pengutamakan alokasi anggaran desa, Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyebutkan banyak jenis kegiatan yang diperuntukkan bagi pemberdayaan perempuan. Di antaranya adalah pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, penyelenggaraan musyawarah kelompok perempuan, pelatihan kepemimpinan perempuan, pelatihan bagi kader desa tentang gender dan kegiatan lainnya (Lampiran I Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020). Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk mengalokasikan dana yang memadai untuk pemberdayaan dan peningkatan kepemimpinan perempuan di desa.

Dokumen perencanaan pembangunan desa, seperti yang termuat dalam Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, secara eksplisit meminta pencantuman jumlah penerima manfaat perempuan untuk setiap kegiatan yang dimuat dalam "format daftar gagasan dusun/kelompok" dan "format rencana kegiatan pembangunan desa" (Lampiran II). Format tersebut akan secara jelas menunjukkan berapa jumlah dan persentase penerima manfaat perempuan dibandingkan dengan penerima manfaat laki-laki, dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga, seharusnya setiap tahun pemerintah desa dapat mengeluarkan data penerima manfaat pembangunan secara terpilah berdasarkan jenis kelamin.

Di tingkat kabupaten, beberapa kebijakan untuk mendukung pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan di desa telah dibuat oleh pemerintah kabupaten. Di Kabupaten Lombok Barat, pemerintah kabupaten mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa. Peraturan tersebut menegaskan bahwa musyawarah desa harus dihadiri oleh tokoh perempuan sebagai salah satu unsur masyarakat (Pasal 6) dan perwakilan kelompok perempuan (Pasal 107). Keterwakilan perempuan di BPD juga secara tegas dinyatakan dengan kuota 30 persen (Pasal 90). Dalam melaksanakan program desa, salah satu kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa ialah menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal (Pasal 189).

Di Kabupaten Lombok Timur, Bupati juga mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. Peraturan tersebut menyatakan bahwa salah satu belanja kegiatan dalam subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga, adalah pelatihan dan penyuluhan tentang pemberdayaan perempuan (Pasal 12). Dalam format rencana kerja kegiatan desa, jumlah penerima manfaat perempuan juga harus dituliskan dalam kolom tersendiri (Lampiran H.2. Format Rencana Kerja Kegiatan Desa).

Dalam praktik pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pada 2019, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan dengan melibatkan banyak perempuan, anak, pemuda, pelajar, mahasiswa, lansia, dan penyandang disabilitas untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang menerapkan perspektif gender dan inklusif (Diskominfo Kabupaten Lombok Utara, 2019). Sedangkan di tingkat desa, musyawarah khusus perempuan di tingkat desa juga sudah dilaksanakan di beberapa kabupaten di NTB, yaitu di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima. Musrenbang khusus tersebut juga melibatkan berbagai unsur kelompok masyarakat termasuk lansia, warga miskin, dan penyandang disabilitas. Kerja sama lembaga perlindungan anak dan KOMPAK di wilayah tersebut telah mendorong keterlibatan 1.160 perempuan dalam musyawarah khusus perempuan di 36 desa. Salah satu faktor penting atas keberhasilan pelaksanaan musyawarah khusus perempuan tersebut ialah adanya dukungan kepala daerah (Duta Selaparang, 2020).

Rincian pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan disebutkan dalam beberapa regulasi dan kebijakan sebagai berikut:

TABEL 4. REGULASI DAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMBERDAYAAN DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI DESA

REGULASI DAN KEBIJAKAN	PEMBERDAYAAN DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	<p>Pasal 58 ayat (1): Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang, dengan memerhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.</p> <p>Penjelasan Pasal 54: Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.</p>
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	<p>Pasal 72 ayat (1): Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.</p> <p>Pasal 80 ayat (3) huruf H: Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.</p> <p>Pasal 121 ayat (2): Mengenai pelaksanaan pembangunan desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender. <p>Pasal 127 ayat (2) huruf D: Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.</p>

**REGULASI DAN
KEBIJAKAN**

PEMBERDAYAAN DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Permendagri
No. 114 Tahun 2014
tentang Pedoman
Pembangunan Desa

Pasal 6 ayat (5) huruf D: Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

c) **Kelompok perempuan**

Pasal 8 ayat (4):

- i. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.
- ii. Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **mengikutsertakan perempuan.**

Pasal 15 ayat 3 huruf H:

- 1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi.
- 2) Pelibatan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- 3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), antara lain:
 - h) **Kelompok perempuan.**

Pasal 33 ayat (4):

- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **mengikutsertakan perempuan.**

Pasal 40 ayat (3):

- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **mengikutsertakan perempuan.**

Pasal 46 ayat (3) huruf H:

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
 - h) **perwakilan kelompok perempuan.**

Permendesa
PDPT No. 2 Tahun
2015 tentang
Musyawarah Desa

Pasal 5 ayat (3): Unsur-unsur peserta dalam kegiatan musyawarah desa.

- Tokoh adat
- Tokoh agama
- Tokoh Masyarakat
- Perwakilan Kelompok Tani
- Perwakilan Kelompok Nelayan
- Perwakilan Kelompok Perajin
- **Perwakilan Kelompok Perempuan**

Permendagri No. 20
Tahun 2018 tentang
Pengelolaan
Keuangan Desa

Pasal 17 ayat (4): Salah satu subbidang dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah **pemberdayaan perempuan**, perlindungan anak, dan keluarga.

Lampiran:

Salah satu kegiatan dalam subbidang tersebut ialah **pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan**, dengan kode rekening 4.4.01.

Dalam format rencana kerja kegiatan desa, **jumlah sasaran perempuan** harus disebutkan dalam tabel.

REGULASI DAN KEBIJAKAN	PEMBERDAYAAN DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
Permendesa PD TT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020	Lampiran I. Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Bab I, bagian F, nomor 6: Bagian dari kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah: menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan , anak, dan kelompok marginal, di antaranya ialah: <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal. - Pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes. - Pelatihan gender bagi kader desa.
Permendesa PD TT No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pasal 11: (1) Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan memerhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan , anak, dan kelompok lainnya. Lampiran II. Format Daftar Gagasan Dusun/Kelompok dan Format Rencana Kegiatan Pembangunan Desa: Jumlah penerima manfaat perempuan harus dicantumkan.

3.2.2. BERBAGAI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA

Untuk pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, Kementerian Dalam Negeri telah mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk membuat program tersebut. Pada awal 2020, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 460/813/SJ yang ditujukan kepada Gubernur dan SE Nomor 460/812/SJ tanggal 28 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Isi dari SE itu adalah meminta seluruh kepala daerah untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerahnya masing-masing (Antara, 2020).

Perintah tersebut tentunya juga berlaku untuk Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, dan Brebes yang menjadi bagian dari lokasi Akademi Paradigta. Secara nasional, pemerintah menggunakan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender²⁰ untuk mengukur tingkat pemberdayaan perempuan di Indonesia. Sedangkan di daerah, target program pemberdayaan perempuan ditentukan oleh masing-masing daerah, melalui target capaian perencanaan pembangunan baik di RPJMD maupun rencana strategis organisasi perangkat daerah terkait.

²⁰ Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur sejauh mana laki-laki dan perempuan dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, termasuk ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk menunjukkan sejauh mana perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Di Kabupaten Lombok Timur, program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Dalam Rencana Strategis DP3AKB Tahun 2019–2023, Dinas menargetkan peningkatan peran perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi dari 45,9 persen (2018) menjadi 46,5 persen (2023). Dinas juga akan memfasilitasi 10 Sekolah Perempuan²¹ sampai tahun 2023. Di samping itu, Dinas juga akan meningkatkan persentase perangkat daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), dari 30 persen (2018) menjadi 80 persen (2023), dan persentase kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) yang aktif, dari 25 persen (2018) menjadi 70 persen pada 2023 (Kabupaten Lombok Timur 2019). Berdasarkan target-target tersebut, pada 2023, diperkirakan tingkat kepemimpinan perempuan di lembaga masyarakat, pemerintahan desa, dan BPD seharusnya mengalami peningkatan yang signifikan.

Selain pemerintah, ada juga beberapa organisasi masyarakat sipil yang memiliki program pemberdayaan perempuan di desa, seperti Institut KAPAL Perempuan.²² KAPAL Perempuan menyelenggarakan Sekolah Perempuan sebagai sebuah model pemberdayaan perempuan di akar rumput seperti kelompok masyarakat miskin pedesaan, perkotaan, pesisir, dan kepulauan terpencil. Tujuan utama Sekolah Perempuan adalah mengembangkan kepemimpinan perempuan agar memiliki kesadaran kritis, kepedulian, solidaritas, kecakapan hidup, dan berkomitmen menjadi pelaku perubahan sosial agar terbebas dari kemiskinan. Adapun peningkatan kepemimpinan perempuan bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan perdamaian di seluruh ranah, dimulai dari diri pribadi, keluarga, komunitas, dan mengadvokasikannya ke dalam kebijakan pemerintah (KAPAL Perempuan, 2019).

Sekolah Perempuan yang diselenggarakan oleh KAPAL Perempuan dan mitra-mitranya telah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Tahun 2013, Sekolah Perempuan memperoleh dukungan pendanaan dari program MAMPU-DFAT Australia. Sekolah Perempuan dikembangkan bersama (1) YKPM di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan; (2) LPSDM Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur; (3) KPS2K di Kabupaten Gresik; (4) YAO dan Pondok Pergerakan Nusa Tenggara Timur di Kabupaten dan Kota Kupang, NTT; (5) Pilar Batas Topomoni (PBT) di Kota Padang, Sumatera Barat; dan (6) Bantaran Ciliwung di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Anggota komunitas belajar Sekolah Perempuan berasal dari beragam etnis, suku, agama, gender, dan usia. Mereka belajar secara intensif setiap 1–2 minggu sekali di rumah-rumah penduduk, lahan kosong, pinggir sungai, pinggir pantai, di kantor RW, atau balai desa. Saat ini, Sekolah Perempuan diselenggarakan di enam wilayah yakni Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Jakarta (KAPAL Perempuan, 2019).

²¹ Sekolah Perempuan yang dimaksud dalam Rencana Strategis DP3AKB Kabupaten Lombok Timur adalah merupakan replikasi dari program Sekolah Perempuan yang dilaksanakan oleh KAPAL Perempuan bekerja sama dengan LPSDM yang dilaksanakan di Lombok Timur.

²² Institut KAPAL Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan) didirikan pada 8 Maret 2000, yang bertujuan untuk membangun gerakan perempuan dan gerakan sosial yang mampu mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender serta perdamaian di ranah publik dan privat. KAPAL Perempuan memiliki program pendidikan feminis, riset dan publikasi, advokasi, dan penguatan organisasi. Informasi secara lengkap terkait KAPAL Perempuan dapat dilihat di www.kapalperempuan.org.

Sebagaimana Akademi Paradigta, KAPAL Perempuan juga menggunakan beberapa modul untuk melaksanakan pelatihan di Sekolah Perempuan. Ringkasan modul tersebut ialah sebagai berikut:

TABEL 5. **MODUL PENDIDIKAN ADIL GENDER DARI KAPAL PEREMPUAN**

ASPEK	PENJELASAN
TUJUAN	Modul Pendidikan Adil Gender (PAG) untuk Perempuan Marginal yang disusun KAPAL Perempuan bertujuan untuk memberikan panduan/pedoman bagi fasilitator dalam menyelenggarakan Sekolah Perempuan.
PESERTA	Perempuan marginal di perkotaan dan pedesaan.
WILAYAH	Sudah diterapkan di tiga komunitas miskin, yaitu dua komunitas miskin di Jakarta, tepatnya di Kampung Jati dan Ciliwung (2003), serta satu komunitas miskin di sebuah desa di Pulau Nain, Sulawesi Utara (2005). Saat ini, modul tersebut digunakan oleh banyak Sekolah Perempuan di enam provinsi wilayah kerja KAPAL Perempuan dan mitranya.
RINGKASAN	Modul ini adalah upaya untuk memperkuat gerakan pendidikan perempuan, dengan model pendidikan untuk perempuan marginal di perkotaan dan pedesaan yang disebut PAG. PAG mencoba untuk mengintegrasikan proses peningkatan pemikiran kritis, keahlian teknis, dan pengorganisasian perempuan di komunitas agar otonomi tubuh dan politik perempuan marginal dapat dimunculkan dan diperkuat, yang pada gilirannya akan membangun daya tawar perempuan di dalam hubungannya dengan suami, keluarga, dan komunitas. Perempuan tidak hanya terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan di ranah domestik dan publik, tetapi juga memiliki kontrol atas tubuhnya sendiri serta atas keluarga dan komunitasnya. <ol style="list-style-type: none"> 1) Modul 1: Persiapan Sosial 2) Modul 2: Gender 3) Modul 3: Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan 4) Modul 4: Membangun Organisasi 5) Modul 5: Penguatan Ekonomi Perempuan

Sumber: Diolah dari Pulu L dkk, 2006 dan Institut KAPAL Perempuan, 2006

Selain KAPAL Perempuan, di Kabupaten Lombok Timur juga terdapat program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh GEMA ALAM,²³ melalui pengembangan ekonomi rakyat yang dinamakan Sekolah Rakyat. Sejak tahun 2015, GEMA ALAM menggali potensi kekhasan sumber daya alam yang ada di desa dan terkait dengan pemberdayaan perempuan. Berdasarkan potensi tersebut, GEMA ALAM melakukan pemberdayaan perempuan petani kopi dan pengrajin tenun di sekitar Gunung Rinjani. GEMA ALAM fokus pada bagaimana perempuan petani kopi bisa mengolah dan mendistribusikan hasil kopinya, serta bagaimana perempuan penenun bisa menggunakan bahan pewarna beserta cara mendistribusikannya.

Dengan dukungan OXFAM (sampai tahun 2023), GEMA ALAM memiliki program terkait langsung dengan kepemimpinan perempuan yakni (i) sekolah laki-laki baru (edukasi laki-laki tentang kesetaraan gender); (ii) sekolah rakyat, yaitu proses diskusi kampung terkait berbagai isu, bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, dan biasanya kelompok laki-laki dan perempuan dipisahkan dalam diskusi; dan (iii) pelatihan-pelatihan penguatan kapasitas untuk perempuan, seperti advokasi, komunikasi publik, dan negosiasi keputusan. GEMA ALAM telah mengembangkan modul khusus untuk berbagai pelatihan di atas.

²³ Gerakan Masyarakat Cinta Alam (GEMA ALAM) merupakan organisasi yang menyinergikan semua potensi gerakan lingkungan hidup dan hak asasi manusia serta memosisikan diri sebagai bagian dari gerakan rakyat dan gerakan sosial untuk mencapai kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupan. Informasi terkait GEMA ALAM dapat dilihat pada www.gemaalamntb.org.

Salah satu capaian utama GEMA ALAM adalah dukungan pemerintah desa terhadap pelaksanaan pelatihan kepemimpinan perempuan di tingkat desa. GEMA ALAM menyatakan bahwa advokasi melalui pelatihan kepemimpinan perempuan telah berhasil membuat pemerintah desa bersedia memberikan alokasi Dana Desa untuk pelatihan kepemimpinan perempuan. Adapun pemberdayaan perempuan di tingkat desa lebih banyak berfokus pada pemberdayaan ekonomi (GEMA ALAM, Oktober 2019).

3.2.3. ORGANISASI PEREMPUAN DI DESA

Organisasi perempuan di desa memiliki identitas dan latar belakang yang beragam. Ada organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga sosial, dan juga kelompok perempuan informal yang diinisiasi oleh perempuan desa. Beberapa jenis organisasi perempuan di desa ialah sebagai berikut:

1. Organisasi perempuan yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK dibentuk pemerintah sejak Orde Baru, mulai dari tingkat nasional sampai di tingkat desa/kelurahan. Saat ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, salah satu tujuan gerakan PKK adalah kesetaraan dan keadilan gender (Pasal 1 ayat 1). PKK juga memiliki 10 program pokok PKK sebagai program utama yang dilaksanakan di hampir semua desa. Akan tetapi, di antara 10 program tersebut tidak ada program yang dengan jelas menasar untuk kesetaraan dan keadilan gender (Pasal 11).

Dengan pelaksanaan UU Desa, PKK juga mendapatkan peran penting di desa sebagai salah satu lembaga di desa. PKK akan selalu dilibatkan dalam proses musyawarah desa, termasuk dalam perencanaan pembangunan desa. PKK juga secara rutin mendapatkan anggaran pelaksanaan kegiatan dari pemerintah desa. Secara umum, banyak PKK di desa masih fokus pada pelaksanaan 10 program pokok PKK saja.

Di beberapa daerah, khususnya PKK di tingkat kabupaten/kota yang sudah mulai berhubungan dengan LSM yang bekerja untuk isu kesetaraan gender, mereka dapat menerima isu-isu kesetaraan gender. Meskipun di tingkat desa PKK tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi perempuan yang ada, PKK masih merupakan representasi negara, khususnya terkait dengan isu perempuan. PKK juga memiliki struktur yang kuat dari desa sampai nasional dan berada di semua desa di seluruh Indonesia. Di tengah keterbukaan informasi dan demokrasi, kader PKK saat ini banyak memiliki 'posisi' lain, seperti menjadi pengurus di organisasi perempuan berbasis keagamaan, petugas posyandu, bahkan kader politik dari partai tertentu. Hal ini sedikit banyak membawa perubahan dalam organisasi PKK, tetapi secara organisasi, PKK belum dapat merumuskan arahnya dalam konteks dinamika perubahan sosial, budaya, dan politik di desa. Pada konteks ini, dapat dilakukan revitalisasi untuk merespons isu-isu keadilan gender terkini yang dihadapi oleh perempuan desa. Revitalisasi tersebut membutuhkan peran aktif dari pemerintah di semua tingkatan, dan bisa dimulai dari tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan secara paralel (Soetjipto dan Adelina, 2013).

2. Organisasi perempuan yang dibentuk oleh lembaga keagamaan, seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah, dan Nasyyatul Aisyiyah

Muslimat dan Fatayat NU adalah badan otonom dalam lingkungan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Muslimat beranggotakan para perempuan dewasa yang sering kali memiliki kegiatan majelis taklim (pengajian), kegiatan amal seperti pembinaan rohani bagi anak dan remaja, dan santunan untuk anak yatim. Muslimat juga mengelola lembaga pendidikan untuk anak-anak (NU Online 2015). Muslimat NU di Kabupaten Brebes juga melakukan pelatihan pemberdayaan perempuan melalui kerja sama dengan DP3AKB dan Dinas Kesehatan.

Sedangkan Fatayat NU merupakan organisasi perempuan di bawah NU yang beranggotakan perempuan muda. Fatayat memiliki kegiatan yang hampir sama dengan Muslimat NU, termasuk kegiatan pemberdayaan perempuan. Sejak 1990, Fatayat NU sudah melaksanakan latihan-latihan analisis gender. Mereka menggunakan analisis gender sebagai pisau bedah untuk melihat teks-teks keagamaan Islam, terutama Al-Quran, Hadis, dan berbagai literatur hukum Islam dengan paradigma baru, terutama yang berkaitan dengan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan (Fatayat NU t.t.).

Aisyiyah dan Nasyyatul Aisyiyah adalah organisasi perempuan yang berada dalam naungan Muhammadiyah. Aisyiyah memiliki beberapa program terkait pemberdayaan masyarakat, seperti pendidikan anak, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, dan pengajian. Sedangkan Nasyyatul Aisyiyah adalah organisasi untuk perempuan muda, sebagaimana Fatayat di NU. Nasyyatul Aisyiyah memiliki beberapa program unggulan untuk membangun kepemimpinan perempuan, seperti kelas pengasuhan, tanggap bencana, kesehatan, manajemen organisasi, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan organisasi di tingkat desa. Banyak kader organisasi yang kemudian juga menjadi pemimpin di masyarakat atau kelembagaan di desa.

Organisasi perempuan berbasis keagamaan tersebut memiliki jaringan keanggotaan yang luas di Indonesia. Saat ini jumlah anggota Muslimat NU diperkirakan sekitar 32 juta orang. Jumlah tersebut berasal dari anggota yang tersebar di 34 pimpinan wilayah (PW), 524 pimpinan cabang (PC), 2.295 pimpinan anak cabang (PAC), dan 26.000 pimpinan ranting ('Kiprah Cemerlang' 2019). Fatayat NU memiliki anggota sekitar lima juta orang yang berasal dari 26 pengurus daerah, 308 pengurus cabang, dan 14.000 pengurus ranting (Kowani t.t.). Aisyiyah juga saat ini telah memiliki 33 pimpinan wilayah (setingkat provinsi), 370 pimpinan daerah (setingkat kabupaten), 2.332 pimpinan cabang (setingkat kecamatan) dan 6.924 pimpinan ranting atau setingkat desa/kelurahan (Muhammadiyah t.t.). Struktur organisasi yang kuat dari nasional sampai desa dan tersebar di banyak wilayah di Indonesia dapat menjadi peluang untuk melakukan peningkatan kepemimpinan perempuan secara masif di banyak desa di Indonesia.

3. Kelompok perempuan nonformal

Di banyak desa, kelompok perempuan nonformal kerap kali dibentuk oleh perempuan yang berada dalam satu wilayah tertentu, misalnya kelompok arisan dalam satu rukun tetangga, atau dibentuk berdasarkan tradisi setempat, misalnya Kelompok Selapanan (dari selamatan dalam tradisi Jawa) yang memiliki kegiatan setiap 35 hari, atau dibentuk oleh organisasi keagamaan di desa, seperti kelompok pengajian (kegiatannya ialah kajian keagamaan). Kelompok nonformal tersebut tidak memiliki peraturan organisasi (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) sebagaimana PKK atau organisasi perempuan berbasis keagamaan. Mereka juga tidak dilibatkan secara resmi dalam pertemuan-pertemuan kegiatan pemerintah desa. Tetapi, terkadang kelompok-kelompok ini juga melakukan advokasi kepada pemerintah desa, seperti Kelompok Selapanan di Kabupaten Brebes. Kelompok ini berhasil mengadvokasikan pembuatan identitas hukum untuk masyarakat penyandang disabilitas di beberapa desa (Wawancara dengan Pemdes, Oktober 2019).

4. Organisasi yang merupakan jaringan dari banyak organisasi perempuan di tingkat kabupaten, yaitu Gerakan Organisasi Wanita (GOW)

GOW adalah gabungan dari hampir seluruh organisasi perempuan, baik yang didirikan oleh pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Di Kabupaten Brebes misalnya, anggota GOW terdiri dari PKK, Fatayat, Muslimat, Aisyiah, Nasyatul Aisyah, dan beberapa organisasi lainnya. Tahun 2019, DP3AKB Kabupaten Brebes memberikan dana sebesar Rp100 juta kepada GOW untuk pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan. Sedangkan GOW di Kabupaten Lombok Barat mendapatkan anggaran sebesar Rp700 juta per tahun dari pemerintah daerah. Saat ini, terdapat 23 organisasi yang tergabung dalam GOW Kabupaten Lombok Barat. Pada dasarnya, GOW ada hampir di seluruh provinsi di Indonesia, namun pola koordinasi mereka tidak terpusat. GOW biasanya dipimpin oleh istri kepala daerah, misalkan istri Gubernur (kalau gubernurnya laki-laki).

5. Organisasi perempuan yang dibentuk oleh organisasi masyarakat sipil, seperti kelompok Sekolah Perempuan dan Serikat Pekka

Perempuan yang mengikuti Sekolah Perempuan yang dilaksanakan oleh KAPAL Perempuan dan mitra-mitranya juga mengorganisasi diri dalam bentuk organisasi perempuan di desa. Begitu juga dengan banyak perempuan yang mengikuti berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PEKKA, termasuk Akademi Paradigta, menggabungkan diri dalam wadah Serikat Pekka yang ada di banyak desa di Indonesia.

Serikat Perempuan Kepala Keluarga atau Serikat Pekka dibentuk pada 2008 sebagai organisasi berbasis massa yang otonom. Kemudian tahun 2009, Serikat Pekka dari berbagai wilayah di Indonesia membentuk Federasi Serikat Pekka di tingkat nasional yang diharapkan menjadi penggerak Gerakan Sosial Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA t.t.).

TABEL 6. PERBANDINGAN ORGANISASI PEREMPUAN

	PEKKA	PKK	KAPAL PEREMPUAN	MUSLIMAT NU FATAYAT NU AISYIAH NASYIATUL AISYIAH
Wilayah Kerja	Nasional dan subnasional	Nasional dan subnasional	Nasional atau subnasional	Nasional dan subnasional
Metode Kerja	Membangun struktur dan jaringan organisasi dari tingkat nasional sampai ke desa	Pembentukan Tim Penggerak dari tingkat nasional sampai ke desa	Bermitra dengan organisasi perempuan lain di tingkat lokal	Bekerja dengan sistem cabang dan ranting organisasi (namun dapat bekerja secara mandiri)
Materi Pemberdayaan Perempuan	Berbasis pemenuhan hak-hak perempuan khususnya perempuan kepala keluarga	Berbasis penguatan keluarga yang penyelenggaraannya kerap tergantung dari hari-hari peringatan nasional terkait	Berbasis pada pemenuhan hak-hak perempuan	Berbasis pada penguatan keluarga termasuk pemenuhan hak-hak perempuan khusus dari perspektif Agama Islam
Kerja sama dengan Pemerintah	Prasyarat dan wajib/ pasti dilakukan terutama di tingkat desa	Merupakan bagian dari program pemerintah kendati tetap dilaksanakan secara mandiri	Dilakukan tergantung pada tuntutan program aksi dan kegiatan organisasi	Dilakukan secara <i>ad-hoc</i>
Sumber pendanaan	Sumber tidak mengikat yang sebagian besar berasal dari organisasi internasional dan donor	Pemerintah (APBN, APBD, dan APB Desa)	Dapat berasal dari mitra organisasi lain baik organisasi internasional maupun pemerintah daerah	Berasal dari anggota dan induk organisasi tersebut. Hanya sebagian kecil dari pemerintah dan pihak lain.
Potensi keberlanjutan	Dapat berkelanjutan namun membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah (kebijakan dan anggaran) serta strategi khusus yang lebih inklusif	Dapat berkelanjutan, karena merupakan bagian program pemerintah yang mendapatkan alokasi dana setiap tahun	Dapat berkelanjutan namun membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah (kebijakan dan anggaran)	Dapat berkelanjutan namun membutuhkan dukungan penuh dari organisasi tersebut (anggaran dan sumber daya manusia)

3.2.4. DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN DESA UNTUK AKADEMI PARADIGTA

Sampai dokumen ini selesai ditulis, belum ada dukungan langsung yang diberikan pemerintah pusat untuk pelaksanaan Akademi Paradigta. Akan tetapi, justru pembelajaran dan praktik baik Akademi Paradigta yang akan diadopsi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Direktur PEKKA, Agustus 2020). Walaupun belum mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, pelaksanaan Akademi Paradigta mendapatkan cukup banyak dukungan dari pemerintah kabupaten dan desa. Dukungan tidak hanya dalam bentuk alokasi anggaran, tetapi juga dukungan lainnya seperti penyediaan tempat pelatihan dan fasilitasi mekanisme musyawarah untuk perempuan. Beberapa bentuk dukungan tersebut ialah:

A. DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN:

1. **Dukungan kebijakan:** Di Kabupaten Lombok Barat, pemerintah kabupaten mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa. Peraturan tersebut menegaskan keterwakilan perempuan dalam musyawarah desa, kuota 30 persen keanggotaan perempuan di BPD, dan penyusunan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan perempuan. Di Kabupaten Lombok Timur, Bupati juga mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. Peraturan tersebut menyatakan bahwa salah satu belanja kegiatan dalam subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, adalah pelatihan dan penyuluhan tentang pemberdayaan perempuan.
2. **Dukungan anggaran:** DP3AKB Kabupaten Lombok Timur mendapatkan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp400 juta, yang sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan sekitar Rp36 juta untuk pelaksanaan 12 kegiatan pemberdayaan perempuan dalam setahun. Selain anggaran di DP3AKB, alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan juga berada di dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pendidikan. Kegiatan yang sering dilakukan oleh berbagai instansi tersebut ialah pelatihan, pemberian modal kegiatan, dan pendampingan kelompok perempuan.
3. **Dukungan nonfinansial:** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur mendorong banyak kepala desa untuk mengalokasikan lebih banyak Dana Desa bagi pemberdayaan masyarakat, termasuk perempuan desa. Dinas PMD secara aktif mempromosikan kegiatan pemberdayaan perempuan di desa. Bahkan, Dinas PMD juga mencoba menjembatani kelompok perempuan desa untuk mendapatkan akses program dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KOMPAS, 2019).

B. DUKUNGAN PEMERINTAH DESA:

1. **Dukungan kebijakan:** Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) perempuan di desa yang berada di Kabupaten Lombok Timur mulai diselenggarakan pada 2019 dengan tujuan untuk perencanaan anggaran tahun 2020 yang lebih inklusif. Musrenbang berjalan selama satu hari penuh (padahal biasanya hanya berjalan setengah hari), di mana para pesertanya adalah para perempuan desa. Salah satu desa yang melaksanakan musrenbang desa (musrenbangdes) perempuan adalah Desa Bagik Payung Induk di Kabupaten Lombok Timur.

Kepala Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur membuat Keputusan Kepala Desa Nomor 188/16/BGP/2019 tentang Pelibatan Perwakilan Perempuan dalam Musrenbangdes Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Keputusan tersebut secara jelas menyebutkan PEKKA, KPM, PKK, Muslimat, dan kader posyandu sebagai perwakilan perempuan dalam musrenbangdes.

2. **Dukungan pendanaan:** Di sebagian desa, pemerintah desa mengalokasikan dana untuk mendukung peserta kegiatan Akademi Paradigta. Contohnya, Akademi Paradigta membuat perjanjian kerja sama dengan kepala desa di Kabupaten Lombok Timur, NTB, di mana pemerintah desa menyediakan gedung serbaguna sebagai tempat pelatihan dan alokasi dana sebesar Rp15 juta untuk 15 orang peserta pelatihan Akademi Paradigta atau rata-rata Rp1 juta per orang (KOMPAK, 2019). Data KOMPAK menunjukkan bahwa selama 2016–2018, pemerintah desa di Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 juta untuk mendukung pelaksanaan Akademi Paradigta.

"Alokasi anggaran untuk PEKKA dimulai tahun 2019 sebesar Rp6–7 juta yang berasal dari sumber pendapatan asli desa. Kemudian, tahun 2000 dimasukkan dalam APB Desa di anggaran pemberdayaan perempuan yang besarnya menjadi Rp15 juta untuk PEKKA," kata salah satu kepala desa di Kabupaten Lombok Timur.



4

ANALISIS PEMBELAJARAN AKADEMI PARADIGTA

Analisis pembelajaran dari pelaksanaan Akademi Paradigta dilakukan untuk beberapa aspek penentu keberhasilan program tersebut. Aspek penting yang dianalisis adalah motivasi peserta, struktur pelaksanaan program, metode dan modul pelatihan, serta dukungan pemerintah. Di samping itu, analisis juga dilakukan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan Akademi Paradigta. Analisis tersebut menjadi dasar untuk penentuan rekomendasi dalam melakukan replikasi atau perluasan pelaksanaan peningkatan kepemimpinan perempuan di banyak desa di Indonesia.

4.1. MOTIVASI PESERTA

4.1.1. KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

Kegiatan pemberdayaan ekonomi dan koperasi PEKKA di desa sebagai daya tarik utama dari partisipasi perempuan desa di Akademi Paradigta. Para kader PEKKA dan alumni Akademi Paradigta di Desa Bagik Payung Induk, Lombok Timur menyampaikan bahwa kegiatan ekonomi dan koperasi PEKKA merupakan daya tarik utama keikutsertaan mereka dalam kegiatan Akademi Paradigta. Meskipun belum semua wilayah dan desa PEKKA memiliki koperasi, namun kegiatan ekonomi Pekka telah cukup menarik perhatian perempuan di desa. Di salah satu desa di Lombok, Koperasi Pekka dikelola dan dikoordinasikan oleh Serikat Pekka, telah memiliki perputaran uang sekitar Rp3 miliar per tahun yang didapatkan dari simpanan wajib dan simpanan sukarela anggota.

4.1.2. KEBANGGAAN PERSONAL DAN PENINGKATAN PENGETAHUAN

Di samping daya tarik pemberdayaan ekonomi, berpartisipasi di Akademi Paradigta juga merupakan suatu kebanggaan personal bagi para peserta dan alumninya. Mereka sangat bangga dengan penyebutan Akademi Paradigta sebagai proses pelatihan. Akademi Paradigta terdengar sebagai suatu proses perkuliahan dan bukan hanya sekadar pelatihan pemberdayaan kepemimpinan perempuan biasa. Salah satu peserta Akademi Paradigta di Kabupaten Brebes mau berpartisipasi dalam Akademi karena melihat salah seorang tetangganya yang telah menjadi alumni akademi, dan menurutnya, tetangganya seperti memperoleh "kedudukan sosial" yang lebih tinggi. Sedangkan peserta lainnya mengakui para alumni Akademi Paradigta memiliki pengetahuan lebih baik tentang desa dan oleh sebab itu bisa memengaruhi kehidupan perempuan desa menjadi lebih baik. Alasan ini mengundang lebih banyak perempuan desa untuk ikut serta di Akademi Paradigta.

"Keikutsertaan saya di Akademi Paradigta tidak hanya menambah teman, tapi juga menambah pengetahuan tentang desa sebagaimana saya lihat pengalaman dari alumni Akademi Paradigta," ujar salah satu peserta pelatihan Akademi Paradigta di Kabupaten Brebes.

4.2. STRUKTUR PELAKSANAAN

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab III, struktur pelaksana program Akademi Paradigta terdiri dari koordinator nasional, koordinator wilayah, mentor, dan akademia (peserta). Koordinator nasional adalah dari staf Seknas PEKKA yang diberikan tugas secara khusus untuk mengelola pelaksanaan Akademi Paradigta. Koordinator wilayah juga berasal staf Seknas atau fasilitator PEKKA yang ada di daerah, yang kemudian ditugaskan untuk mengelola pelaksanaan akademi di daerah. Sedangkan mentor di tingkat desa ialah kader PEKKA yang merupakan warga di desa tersebut. Dengan demikian, jenjang pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan Akademi Paradigta dapat dilakukan dengan baik di semua tingkatan, karena semua pelaksana program sudah mengenal baik PEKKA, anggota Serikat Pekka, dan pemangku kepentingan terkait. Akademi Paradigta pada dasarnya merupakan salah satu kegiatan organisasi PEKKA, sehingga pengelolaannya juga tidak dilakukan secara terpisah dari struktur organisasi yang sudah ada.

Posisi kader PEKKA yang merupakan penduduk di desa tempat pelaksanaan Akademi Paradigta telah mempercepat proses sosialisasi dan keberlanjutan kegiatan akademi. Di semua desa PEKKA, para mentor yang bekerja untuk pengorganisasian kader PEKKA dan pelaksanaan Akademi Paradigta berasal dari desa setempat. Mereka telah mengenal aparat desa dan masyarakat desa dengan baik, termasuk budaya dan kebiasaan lokal. Oleh sebab itu, lebih mudah bagi PEKKA, melalui para mentor/kader, dalam menjelaskan pelaksanaan Akademi Paradigta dan mengidentifikasi calon peserta pelatihan. Pengalaman seorang fasilitator PEKKA yang ditugaskan melakukan pengorganisasian Serikat Pekka di desa lain (bukan wilayah tempat tinggalnya), dia mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan kepada perempuan desa dan juga pemerintah desanya. Meskipun begitu, kajian ini juga menemukan praktik seperti yang tertulis di bawah ini dalam pelaksanaan Akademi Paradigta di luar lokasi kerja PEKKA, di mana Serikat Pekka belum terbentuk:

1. Mengirimkan mentor dari desa lain yang sudah terlatih saat diperlukan untuk mengajar di wilayah yang belum memiliki Serikat Pekka, bersamaan dengan proses membangun jaringan untuk membangun Serikat Pekka.
2. Menggunakan mentor yang direkrut dari kader atau anggota tim lembaga mitra di tingkat lokal. Lembaga mitra yang tercatat pernah bekerja sama dengan PEKKA dalam hal ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW), Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (Alpen Sultra), dan Himpunan Maluku untuk Kemanusiaan (HUMANUM).

Mentor memiliki peranan penting dalam memfasilitasi kegiatan Akademi Paradigta di tingkat desa. Mentor memperkenalkan dan melakukan sosialisasi Akademi Paradigta kepada kepala desa, pemimpin lokal, dan penduduk desa. Mentor menjelaskan organisasi PEKKA (sebagai latar belakang informasi terkait akademi), beragam kegiatan PEKKA, termasuk Akademi Paradigta dan KLIK (Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi) PEKKA kepada para pemangku kepentingan di desa. Mentor juga mengelola dan menyelesaikan kebutuhan administrasi dalam proses perencanaan dan persiapan implementasi akademi, termasuk urusan surat menyurat dari organisasi PEKKA tentang rencana implementasi Akademi Paradigta untuk setiap desa. Tanpa keberadaan dan peran mentor di desa, pelatihan Akademi Paradigta akan sulit dilaksanakan oleh organisasi yang berada di luar desa.

Para peserta Akademi Paradigta harus menjadi bagian organisasi perempuan yang ada di desa, baik Serikat Pekka atau organisasi lain seperti PKK. Pembentukan Serikat Pekka atau tersedianya organisasi perempuan di desa sebelum pelaksanaan Akademi Paradigta akan mempermudah penyelenggaraan akademi, baik pada saat pelaksanaan pelatihan maupun pasca pelatihan, yakni ketika akademi menerapkan pengetahuan di masyarakat.

Serikat Pekka atau organisasi perempuan lainnya memperkuat rasa solidaritas para kader yang menjadi anggotanya. Sebagai bagian dari organisasi, akademi memiliki teman dalam kelompok atau "*peer group*" baik dalam proses pelatihan maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat dan aparat desa. Bagi anggota Serikat Pekka, melalui jaringan PEKKA yang ada, mereka yang menjadi alumni Akademi Paradigta akan senantiasa memperoleh informasi dari organisasi PEKKA mengenai pertemuan yang akan dilakukan di tingkat desa dan kabupaten, serta informasi-informasi lain terkait proses pembangunan di tingkat lokal. Selain itu, sebagai anggota Serikat Pekka, mereka juga dapat mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi dan peluang usaha yang dikembangkan organisasi PEKKA seperti koperasi yang pengelolaannya di bawah Serikat Pekka.

Selain pengelolaan kegiatan Akademi Paradigta, pelaksanaan akademi di desa yang baru membutuhkan prasyarat berupa:

- (a) Keberadaan organisasi perempuan di desa yang memiliki kegiatan aktif di desa, dan
- (b) Mentor yang berasal dari desa setempat dan memiliki kapasitas untuk mengorganisasi anggotanya serta bekerja sama dengan pemerintah desa.

Pembentukan organisasi perempuan di desa bisa dilakukan dengan membentuk Serikat Pekka (seperti yang dilakukan oleh PEKKA), atau bekerja sama dengan kelompok perempuan di desa yang sudah didampingi oleh LSM lain, atau memperkuat organisasi PKK yang sudah ada di desa. Berdasarkan pengalaman PEKKA, apabila di desa belum ada Serikat Pekka atau organisasi perempuan yang difasilitasi LSM lain, maka dibutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk melakukan pengorganisasian perempuan di desa.

Hal ini juga termasuk apabila akan bekerja sama dengan organisasi PKK di desa, dibutuhkan pendampingan satu tahun untuk memperkuat isu kesetaraan gender dan aktivitas pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh PKK. Setelah ada organisasi perempuan yang aktif di desa, maka pelatihan Akademi Paradigta dapat dilaksanakan, karena sudah ada wadah untuk melakukan praktik lapangan dalam pelatihan tersebut (Direktur PEKKA, Agustus 2020).

4.3. METODE DAN MODUL PELATIHAN

Metode pengajaran Akademi Paradigta merupakan kombinasi dari pelatihan di kelas (dalam bentuk pengajaran dan diskusi) dan praktik di lapangan (keterlibatan alumni dan kader dalam musrenbangdes, dan pertemuan lainnya di desa/kabupaten). Beberapa kepala desa menyebutkan bahwa metodologi PEKKA dan Akademi Paradigta merupakan pembelajaran yang unik, sehingga membuat proses pelatihan dan pemberdayaan menjadi lebih efektif. Kepala Desa Bagik Payung Induk di Lombok Timur mengakui bahwa kegiatan PEKKA dan Akademi Paradigta lebih produktif karena memberikan pemahaman kepada para perempuan melalui metode pembelajaran yang berbeda seperti bernyanyi.

Di antara 16 modul pelatihan Akademi Paradigta, ada 3 modul yang menurut para kader PEKKA dan alumni Akademi Paradigta sangat membantu meningkatkan kepemimpinan mereka. Ketiga modul tersebut adalah tentang:

- (i) Perempuan dan Desa Harapan;
- (ii) Sungai Kehidupan (Perempuan Pemimpin), dan
- (iii) Rancangan APB Desa. Modul Perempuan dan Desa Harapan disukai oleh peserta karena memuat tentang ilustrasi desa yang menjadi impian dari perempuan yang hidup di dalamnya.

Peserta merasa materi ini menarik karena memungkinkan mereka untuk mengungkapkan mimpi dan harapan mereka tentang desa yang mereka tempati. Sedangkan modul Sungai Kehidupan membuat perempuan bisa mengetahui tahapan kehidupannya yang paling berpengaruh dan menjadi refleksi proses perubahan dalam kehidupan mereka. Adapun modul Rancangan Anggaran Desa dapat membuat perempuan belajar tentang cara membaca anggaran dan prosesnya, yang membuat kelompok perempuan di desa menjadi lebih kritis dan paham mengenai proses dan rancangan anggaran desa.

Pemberian informasi mengenai hak perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh proses perencanaan desa adalah bagian yang paling dirasakan penting dan memengaruhi pemahaman mereka tentang tata kelola desa. Pengetahuan akan hak mereka untuk memberikan pendapat inilah yang membawa perubahan, karena mereka merasa menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki hak bersuara di desa. Hal tersebut dikombinasikan dengan berbagai kegiatan pelatihan di Akademi Paradigta yang membuat mereka lebih percaya diri dan bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Sebelum mengikuti kegiatan akademi mereka tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengemukakan pendapat. Mereka juga tidak memahami bahwa suara mereka penting untuk menyuarakan kebutuhan kelompok perempuan, sebagai salah satu kelompok masyarakat di desa, dan tidak pernah terpikir untuk mengkritisi proses dan hasil perencanaan di desa.

4.4. DUKUNGAN PEMERINTAH

Dukungan pemerintah desa kepada PEKKA merupakan modalitas utama dalam pelaksanaan Akademi Paradigta. Dari banyak pengalaman desa di NTB, pemerintah desa yang telah memahami dan percaya pada kontribusi PEKKA kepada masyarakat, akan memberikan dukungan untuk pelaksanaan Akademi Paradigta. Pemerintah desa yang mendukung kegiatan akademi percaya bahwa hasil kegiatan tersebut akan meningkatkan kapasitas kader, yang kemudian akan dapat membantu pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan ekonomi lokal. Keluarnya surat penetapan peserta akademi dari kepala desa adalah salah satu bentuk kepercayaan kepada PEKKA. Hal ini juga didorong oleh fakta keberhasilan kelompok PEKKA di desa yang sudah diketahui oleh pemerintah desa.

Salah satu contoh adalah seorang kepala desa di Lombok Timur yang berpendapat bahwa peran PEKKA di desa telah menjadi pendorong dalam meningkatkan proses pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga ke depan diharapkan dapat mengurangi jumlah pekerja migran desa yang bekerja di luar negeri. Atas kepercayaan inilah, kepala desa tersebut mengalokasikan sejumlah anggaran desa untuk mendukung implementasi Akademi Paradigta.

Di tingkat kabupaten, contoh baik dukungan pemerintah terjadi di Kabupaten Kubu Raya. Selama periode 2018–2020, pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pelaksanaan Akademi Paradigta. Sebagai hasilnya, saat ini sudah lebih dari 1.000 alumni yang dilantik, dan mereka sudah banyak membantu pemerintah desa dan kabupaten dalam proses pembangunan di desa, termasuk dalam penanganan COVID-19 saat ini. Melalui peraturan Bupati Kubu Raya, pemerintah desa diwajibkan mengalokasikan dana pemberdayaan perempuan, termasuk untuk pelatihan Akademi Paradigta, sedangkan mentor dibiayai melalui dana pemerintah kabupaten.

Dari sisi dukungan pendanaan, secara keseluruhan, dalam periode 2018–2020, PEKKA mencatat bahwa dukungan pendanaan untuk pelaksanaan Akademi Paradigta sebesar Rp1,6 miliar. Dukungan tersebut berasal dari 117 pemerintah desa dan sebagian pemerintah kabupaten yang tersebar di delapan provinsi. Alokasi dana tersebut sebagian besar digunakan untuk kebutuhan peserta, mentor, dan perlengkapan serta kebutuhan lainnya selama pelaksanaan pelatihan Akademi Paradigta (Direktur PEKKA, September 2020).

4.5. TANTANGAN PELAKSANAAN AKADEMI PARADIGTA

Di samping praktik baik di atas, pelaksanaan Akademi Paradigta juga mengalami beberapa tantangan. Tantangan yang ditemukan dalam pendokumentasian ini dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Tantangan dari peserta Akademi Paradigta

Kesibukan peserta. Dari data pemantauan yang dilakukan oleh PEKKA, sekitar 20 persen peserta tidak dapat menyelesaikan dan dinyatakan tidak lulus dari Akademi Paradigta. Hal ini disebabkan oleh kesibukan peserta sehingga mereka sering meninggalkan kegiatan proses pelatihan, tidak melakukan tugas kerja di lapangan, dan penulisan aksi yang telah dilakukan atau rencana yang akan dilakukan. Kesibukan tersebut bisa dikarenakan kegiatan di rumah atau pekerjaan lainnya.

2. Tantangan dari pelaksana Akademi Paradigta

a. Perbedaan kapasitas fasilitasi dan kreativitas mentor dalam mendukung kesuksesan Akademi Paradigta. Mengingat tantangan yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi dan meningkatkan pemahaman pemerintah desa tentang Akademi Paradigta, maka pelaksanaan kegiatan Akademi Paradigta sering kali bergantung pada kreativitas para mentor di desa. Memperkenalkan atau sosialisasi kegiatan akademi membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang berbeda, dibandingkan dengan upaya memperkenalkan kegiatan PEKKA.

Kendati para mentor telah dibekali pengetahuan oleh organisasi PEKKA antara lain dalam melakukan sosialisasi dan berhadapan dengan para aparat desa, namun pengetahuan yang diperoleh para mentor tidak senantiasa dapat merespons tantangan yang ada di desa. Oleh sebab itu, kreativitas para mentor untuk merespons tantangan yang ada menjadi salah satu syarat utama dalam pelaksanaan Akademi Paradigta. Utamanya dalam membangun pemahaman aparat desa agar mereka dapat memberikan dukungan yang berarti bagi akademi.

- b. **Keterbatasan jaringan dan hubungan kerja dengan organisasi perempuan lain dan aparat pemerintah desa.** Kendati cukup banyak mentor PEKKA yang merupakan aktivis lokal di desa, tapi mereka masih belum memiliki jaringan dan hubungan kerja yang lebih strategis dengan organisasi perempuan lain di tingkat desa, terutama PKK dan aparat pemerintah desa.

Sebagian besar mentor di tingkat desa telah memiliki pengetahuan yang baik tentang berbagai isu/topik pemerintahan desa. Mereka juga memiliki keberanian untuk berbicara dengan aparat desa maupun berbicara di hadapan publik dalam pertemuan-pertemuan desa. Namun sebagian dari mereka belum memiliki kemampuan lobi dan berjejaring, untuk mengembangkan hubungan yang lebih strategis dan produktif dengan organisasi lain di desa serta aparat desa. Sebagai contoh, mentor PEKKA masih belum terampil untuk dapat memiliki hubungan baik dengan organisasi PKK yang dekat dengan pemerintah desa—kendati terdapat kader PEKKA yang merupakan anggota PKK—atau dengan aparat desa yang sulit untuk bekerja sama dengan PEKKA. Sehingga, mentor tersebut tidak banyak mendapatkan informasi dari pemerintah desa, termasuk untuk mendapatkan dukungan Dana Desa (APB Desa).

3. Tantangan dari luar struktur Akademi Paradigta

- a. **Meyakinkan pemerintah desa.** Selama ini, anggota dan kader PEKKA berorganisasi di tingkat desa dalam rangka memperkuat kapasitas personal dan kelompok perempuan di desa, yang sebagian besar berfokus pada pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, organisasi PEKKA banyak melakukan kegiatan pengorganisasian perempuan dalam rangka pembentukan kelompok-kelompok PEKKA di masyarakat. Namun kegiatan Akademi Paradigta senantiasa terkait dengan para pemimpin dan aparat pemerintah terutama di tingkat desa yang sebagian besar adalah laki-laki. Pada umumnya, karena pengetahuan dan pemahaman pemerintah desa yang kurang memadai mengenai pemberdayaan dan cara kerja organisasi PEKKA, maka pemerintah desa sulit untuk menerima pemahaman tentang Akademi Paradigta.
- b. **Tidak semua pemerintah desa memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Akademi Paradigta.** Masih cukup banyak pemerintah desa yang belum memiliki komitmen dalam mendukung pelaksanaan Akademi Paradigta. Sebagai contoh, salah satu kepala desa di lokasi program Akademi Paradigta menyebutkan bahwa aspirasi masyarakat desanya sangat berfokus pada pembangunan infrastruktur. Sehingga, pemerintah desa belum bisa mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan. Di samping itu, di sebagian desa, dukungan pemerintah desa kepada PEKKA menimbulkan kecemburuan sosial dari organisasi perempuan lainnya, terutama PKK yang sudah lama ada di desa. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa Serikat Pekka adalah organisasi baru, tetapi sudah mendapatkan alokasi dana dari pemerintah desa.
- c. **Partisipasi perempuan dalam pertemuan di desa dan proses pengambilan keputusan di tingkat desa sangat tergantung dengan political will (kemauan politik) kepala desa.** Organisasi pendamping masyarakat yang bekerja di masyarakat seperti PEKKA dan LPSDM, turut mendorong pemerintah desa untuk mengikutsertakan perempuan dalam musrenbangdes dan kegiatan desa lainnya. Namun untuk desa yang belum menjadi sasaran dampingan, pelibatan perempuan dalam program desa dan musrenbangdes sering kali hanya diwakilkan oleh PKK, yang belum memiliki pemahaman kesetaraan gender, sehingga usulan yang disampaikan belum menjawab kebutuhan perempuan di desa.



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan informasi serta temuan lapangan yang sudah diuraikan di atas, kesimpulan pendokumentasian pembelajaran dari pelaksanaan Akademi Paradigta ini disusun berdasarkan pertanyaan kunci yang disebutkan di Bab I sebagai berikut:

5.1.1. PERBEDAAN AKADEMI PARADIGTA DENGAN PELATIHAN SEJENIS LAINNYA

PEKKA melaksanakan Akademi Paradigta dengan menggunakan struktur organisasi Serikat Pekka dari tingkat nasional sampai desa. Struktur tersebut sudah terbangun sejak beberapa tahun sebelum program dilaksanakan, sehingga struktur sudah berjalan dan memiliki hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah dan desa. Hal ini memudahkan mekanisme koordinasi, baik internal pelaksana maupun dengan pemerintah desa dan daerah, serta memudahkan dukungan pelaksanaan Akademi Paradigta dari sumber daya PEKKA yang ada di daerah dan nasional.

Mentor yang berasal dari warga desa setempat, merupakan kader PEKKA yang sudah terlatih, dan memiliki kapasitas untuk mengorganisasi perempuan dan bekerja sama dengan pemerintah desa. Perekrutan mentor yang merupakan kader PEKKA di desa tersebut, tentunya memudahkan PEKKA mencari peserta pelatihan akademi dan membangun hubungan baik dengan pemerintah desa yang menetapkan peserta pelatihan. Di samping itu, karena kader PEKKA yang menjadi mentor sudah memiliki pengalaman pengorganisasian perempuan dan pelaksanaan berbagai kegiatan PEKKA di desa, maka mereka sudah cukup dikenal oleh warga maupun pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya penetapan peserta akademi oleh kepala desa sebagai salah satu syarat pelaksanaan Akademi Paradigta. Penetapan peserta akademi oleh kepala desa tidak hanya menunjukkan komitmen dan partisipasi kepala desa, tapi juga hubungan baik yang sudah terjalin antara mentor sebagai koordinator utama di desa dengan pemerintah desa.

Metode dan modul pelatihan yang relevan dan kontekstual dengan kebutuhan pengembangan kepemimpinan perempuan di desa. Gabungan metode belajar di kelas dan praktik langsung dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, advokasi kasus yang dihadapi perempuan, pertemuan dan musyawarah di desa, secara efektif meningkatkan kapasitas dan peran perempuan dalam pembangunan desa. Praktik langsung yang dilaksanakan oleh peserta akademi bersama dengan organisasi perempuan di desa, telah memperkaya pengalaman peserta sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik atas kepemimpinan perempuan. Di samping itu, pemilihan waktu pelaksanaan pelatihan yang sesuai dengan ketersediaan waktu peserta, telah memberikan akses yang besar untuk perempuan di desa dalam mengikuti semua sesi pelatihan. Di antara semua modul yang diajarkan, terdapat tiga modul yang dianggap paling membantu peserta dalam mengembangkan kepemimpinan:

- (i) Perempuan dan Desa Harapan
- (ii) Sungai Kehidupan (Perempuan Pemimpin)
- (iii) Rancangan APB Desa

Keterlibatan peserta sebagai anggota organisasi perempuan di desa terbukti meningkatkan efektivitas pelatihan. Efektivitas peserta dalam menjalankan praktik pelatihan akademi terlihat dalam bentuk mengorganisasi kegiatan pemberdayaan perempuan di desa, memengaruhi isi pertemuan dan musyawarah di desa, dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa. Selain itu ditentukan oleh status mereka sebagai anggota organisasi perempuan di desa, baik melalui Serikat Pekka, PKK, atau organisasi lainnya. Andai saja peserta tidak menjadi anggota organisasi perempuan, maka tidak mudah bagi mereka untuk terlibat aktif secara individual dalam proses pembangunan di desa. Oleh karena itu, keberadaan organisasi perempuan yang memiliki kegiatan aktif di desa menjadi prasyarat untuk dapat dilaksanakannya Akademi Paradigta secara efektif.

Sedangkan dari sisi individual, motivasi peserta pada pengembangan ekonomi dan peningkatan status sosial menjadi alasan utama banyak perempuan yang tertarik mengikuti kegiatan Akademi Paradigta. Selain Akademi Paradigta, PEKKA juga melakukan beberapa kegiatan pemberdayaan ekonomi desa, termasuk pengembangan koperasi. Hal ini menarik banyak perempuan untuk terlibat di dalamnya, yang kemudian juga tertarik untuk mengikuti Akademi Paradigta. Di sisi lain, keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut juga bisa menjadi bagian dari kegiatan peserta dan alumni akademi, sehingga mereka mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu pemberdayaan ekonomi dan pengetahuan hasil dari akademi. Di samping itu, peserta juga melihat bahwa alumni akademi memiliki status sosial yang lebih tinggi, karena mereka mengetahui banyak hal terkait pembangunan desa, dan terlibat aktif dalam banyak kegiatan desa. Hal ini mendorong banyak perempuan untuk mendaftar sebagai peserta akademi.

5.1.2. MOTIVASI DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN DESA

Dukungan dalam bentuk penetapan peserta akademi secara resmi oleh kepala desa melalui surat keputusan, izin untuk pelaksanaan Akademi Paradigta, termasuk alokasi ruang pertemuan di desa dan dukungan pendanaan untuk peserta, memberikan legitimasi yang kuat bagi peserta dan Serikat Pekka untuk secara serius melaksanakan Akademi Paradigta. Dukungan tersebut juga memengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan praktik peserta dalam kegiatan-kegiatan di desa, termasuk partisipasi mereka dalam proses pembangunan desa. Di samping itu, keikutsertaan istri kepala desa atau perangkat desa atau anggota BPD sebagai peserta akademi juga meningkatkan kepercayaan pemerintah desa.

Dukungan banyak diberikan oleh pemerintah desa, termasuk alokasi dari Dana Desa untuk peserta Akademi Paradigta dikarenakan oleh kepercayaan kepala desa atas hasil yang didapatkan oleh peserta. Banyak Kepala Desa yang percaya bahwa akademia akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk ikut aktif berperan dalam pembangunan desa. Mereka dapat membantu pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah desa. Hal ini juga dibuktikan bahwa banyak sekali alumni Akademi Paradigta yang kemudian menjadi kader desa dalam berbagai kegiatan, atau bahkan menjadi bagian dari pemerintah desa atau BPD.

Sedangkan di tingkat kabupaten, sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya misalnya, dukungan berupa kebijakan dan alokasi dana untuk pelaksanaan replikasi Akademi Paradigta diberikan karena pemerintah kabupaten, khususnya Bupati, sudah melihat dan merasakan hasil langsung dari alumni Akademi Paradigta yang memiliki peran signifikan di desa. Oleh karena itu, untuk memperluas jangkauan program di desa-desa lainnya, Bupati mengeluarkan peraturan untuk memberikan dukungan pelaksanaan akademi melalui Dana Desa dan dana pemerintah kabupaten.

Dukungan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam pelaksanaan Akademi Paradigta selama periode 2016–2020 juga membuktikan, bahwa program tersebut atau sejenisnya dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan desa. Selama proses pemberian dukungan tersebut, tidak ditemukan masalah yang berarti baik di pemerintah kabupaten atau desa. Artinya, praktik baik ini dapat diperbanyak di daerah-daerah lain di Indonesia.

5.1.3. KERANGKA HUKUM PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Dari sisi mandat regulasi dan kebijakan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan bupati telah memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk merencanakan, menganggarkan, dan juga melaksanakan pemberdayaan perempuan guna peningkatan kepemimpinan perempuan. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri juga telah menyediakan kode anggaran khusus (4.4.01) untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan. Sehingga, pemerintah desa dapat dengan mudah untuk mengalokasikan anggaran dan melaksanakan kegiatan pelatihan pemberdayaan perempuan dengan mereplikasi atau mengadopsi program Akademi Paradigta atau program sejenis lainnya.

Dari aspek program, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga telah memberikan surat edaran (SE Nomor 460/813/SJ dan SE Nomor 460/812/SJ) kepada seluruh pemerintah daerah untuk membuat program pemberdayaan perempuan. Pemerintah daerah juga sudah memiliki organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan program tersebut. Di samping itu, beberapa organisasi masyarakat sipil juga telah melaksanakan program pemberdayaan perempuan di berbagai daerah. Ketersediaan program dan pengalaman yang sudah ada tersebut dapat menjadi pijakan awal bagi pemerintah desa untuk mengembangkan program kepemimpinan perempuan di desa.

Untuk melaksanakan program kepemimpinan perempuan di desa, sudah ada banyak organisasi perempuan yang dapat diajak bekerja sama, seperti organisasi PKK yang ada di semua desa, Serikat Pekka atau Sekolah Perempuan atau kelompok/organisasi perempuan lainnya yang diinisiasi oleh organisasi masyarakat sipil, dan organisasi perempuan berbasis keagamaan seperti Fatayat NU dan Nasyiatul Aisyiyah. Organisasi-organisasi perempuan tersebut dapat menjadi mitra pemerintah desa dalam mengembangkan kepemimpinan perempuan di desa. Apabila dibutuhkan, pemerintah desa juga dapat bekerja sama dengan OPD di kabupaten seperti DP3AKB dan organisasi perempuan di tingkat kabupaten.

5.1.4. PENDEKATAN DAN KOMPONEN KUNCI PENGUATAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI DESA

Pendekatan yang telah berhasil mengembangkan kepemimpinan perempuan di desa melalui pelaksanaan program Akademi Paradigta adalah:

1. **Menggunakan struktur Serikat Pekka yang sudah ada.** Pelaksanaan program Akademi Paradigta melalui struktur Serikat Pekka yang sudah ada di nasional sampai desa, memudahkan PEKKA untuk mengelola pelaksanaan program tersebut, karena mekanisme dan hubungan kerja sudah terbentuk sampai di tingkat desa.
2. **Memilih mentor dari kader Serikat Pekka dan yang berasal dari desa setempat.** Mentor dipilih dari kader Serikat Pekka yang sudah memiliki pengalaman mengorganisasi dan memfasilitasi pelatihan untuk perempuan desa. Sehingga, mereka sudah memiliki kapasitas yang dibutuhkan

sebagai seorang mentor. Di samping itu, mentor yang dipilih berasal dari desa setempat yang menjadi lokasi program, hal itu terbukti memudahkan proses rekrutmen peserta dan koordinasi serta kerja sama dengan pemerintah desa.

3. **Penetapan peserta pelatihan oleh kepala desa.** Peserta Akademi Paradigta yang ditetapkan oleh kepala desa memberikan legitimasi yang kuat bahwa peserta tersebut akan menjadi kader desa dan terlibat aktif dalam kegiatan di desa. Di samping itu, penetapan peserta oleh Kepala Desa juga telah terbukti dapat menghasilkan dukungan pendanaan dari banyak pemerintah desa.
4. **Menyesuaikan waktu pelaksanaan pelatihan sesuai dengan ketersediaan waktunya peserta.** Kesepakatan waktu pelaksanaan sesi pelatihan antara mentor dan peserta, misalnya alokasi waktu sekitar 2–3 kali pertemuan dalam seminggu, telah memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk secara penuh mengikuti sesi-sesi pelatihan.
5. **Memberikan porsi yang besar (75%) untuk melakukan praktik langsung** dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dan pembangunan di desa. Metode praktik langsung dalam kegiatan desa berhasil memperkaya pengetahuan dan pengalaman peserta untuk melakukan pemberdayaan perempuan di desa. Hal ini juga kemudian mampu memunculkan kepemimpinan perempuan di komunitas, organisasi sosial, dan pemerintahan di desa.
6. **Wisuda kelulusan peserta.** Wisuda kelulusan yang menghadirkan pejabat desa dan kabupaten, memberikan sertifikat kelulusan, dan penyerahan alumni kepada pemerintah kabupaten dan desa, telah mampu membangun kepemilikan pemerintah kabupaten dan desa terhadap alumni akademi. Dengan demikian alumni dapat terlibat aktif dan menjadi mitra pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan desa.

Belajar dari pelaksanaan Akademi Paradigta, komponen kunci yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan kepemimpinan perempuan di desa adalah sebagai berikut:

1. **Organisasi perempuan di desa.** Organisasi perempuan di desa menjadi wadah peserta pelatihan untuk mempraktikkan apa yang sudah dipelajarinya dari sesi-sesi pembelajaran di kelas/ruangan. Untuk itu, keberadaan organisasi perempuan di desa yang secara aktif melaksanakan kegiatannya menjadi penting sebagai persyaratan keberhasilan untuk membangun kepemimpinan perempuan di desa. Melalui organisasi perempuan, kepemimpinan perempuan dapat diwujudkan.
2. **Mentor.** Mentor menjadi salah satu kunci untuk pengembangan kepemimpinan perempuan, karena mereka menjadi pemberi materi, pengelola pelatihan, pendamping peserta saat praktik, dan menjadi teman diskusi ketika peserta/alumni melakukan kegiatan di desa.
3. **Modul dan metode pelatihan yang relevan.** Pengembangan kepemimpinan perempuan membutuhkan modul dan metode yang relevan untuk perempuan desa, tidak hanya dari sisi materi yang akan disampaikan, tetapi juga proses penyampaian dan pilihan waktu pelaksanaannya.
4. **Dukungan pemerintah desa.** Untuk memastikan peserta pelatihan menjadi kader dan mitra pemerintah desa, maka dukungan pemerintah desa diperlukan sejak awal, yaitu sejak penetapan peserta pelatihan sampai kepada penyerahan kembali setelah mereka dinyatakan lulus.

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan praktik baik pelaksanaan Akademi Paradigta, dan juga mempertimbangkan modalitas yang sudah ada di desa, serta tantangan yang dihadapi, maka untuk melakukan penguatan kepemimpinan perempuan di banyak desa di Indonesia, perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:

5.2.1. ORGANISASI PELAKSANA

a. **Apabila penguatan kepemimpinan perempuan akan dilaksanakan secara nasional, yaitu dilaksanakan di banyak desa yang tersebar di semua provinsi, maka dibutuhkan organisasi pelaksana dari organisasi perempuan di tingkat nasional yang memiliki jaringan sampai di tingkat desa.** Berdasarkan temuan modalitas yang sudah ada, organisasi perempuan di tingkat nasional yang memiliki jaringan sampai desa, seperti PKK, Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah dan Nasyyatul Aisyiyah dari Muhammadiyah, dapat menjadi pelaksana program penguatan kepemimpinan perempuan di desa. Mereka memiliki struktur jaringan organisasi sampai desa, dan memiliki kader yang merupakan warga desa setempat. PKK mungkin ada di semua desa di Indonesia, sedangkan organisasi perempuan berbasis keagamaan seperti Muslimat, Fatayat, Aisyiyah, dan Nasyyatul Aisyiyah mungkin tidak memiliki basis di semua desa. Hanya saja, yang perlu dipastikan adalah pemahaman, konsep, dan kapasitas mereka dalam memfasilitasi pelaksanaan pelatihan kepemimpinan perempuan di banyak desa sekaligus.

Khusus untuk PKK, walaupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2017 secara eksplisit menyebutkan salah satu tujuan PKK adalah kesetaraan dan keadilan gender, akan tetapi tujuan tersebut belum secara eksplisit diwujudkan dalam 10 program pokok PKK. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih jelas untuk menjabarkan pencapaian tujuan PKK sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 99/2017. Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri perlu mengeluarkan peraturan menteri sebagai aturan pelaksana PP tersebut yang menggantikan Permendagri No.1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

- b. **Apabila penguatan kepemimpinan perempuan akan dilaksanakan di tingkat kabupaten, yaitu dilaksanakan di banyak desa sekaligus yang berada dalam wilayah kabupaten tersebut, maka organisasi pelaksana bisa berasal dari organisasi perempuan di kabupaten yang memiliki jaringan sampai ke desa.** PKK, organisasi perempuan berbasis keagamaan, dan LSM perempuan yang bekerja di banyak desa, dapat menjadi mitra pelaksana penguatan kepemimpinan perempuan skala kabupaten.
- c. **Apabila penguatan kepemimpinan perempuan akan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah desa, maka pemerintah desa dapat bekerja sama dengan organisasi perempuan yang sudah ada di desa tersebut** dan memiliki kegiatan aktif bersama perempuan di desa.

5.2.2. PEMBENTUKAN MENTOR DARI WARGA DESA SETEMPAT

Mentor dipilih dari warga desa setempat, kader organisasi perempuan di desa, dan warga yang sudah mengenal karakter pemerintah dan masyarakat desanya. Oleh karena itu, kalau organisasi pelaksana memiliki jaringan sampai desa, maka akan mudah bagi mereka untuk membentuk mentor dari kader mereka yang ada di desa tersebut. Di samping itu, mentor juga harus dibekali dengan pengetahuan dan keahlian yang memadai untuk berhubungan dengan pemerintah desa, mengorganisasi perempuan, dan memfasilitasi seluruh kegiatan.

Secara terperinci, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh mentor adalah:

- a. Pengorganisasian masyarakat desa.
- b. Fasilitasi pelatihan untuk perempuan.
- c. Pengelolaan kegiatan (pembagian sumber daya, keuangan, administrasi, dan logistik).
- d. Tata kelola pemerintah desa, termasuk perencanaan dan penganggaran.
- e. Komunikasi dan berjejaring dengan pemangku kepentingan di desa.
- f. Advokasi kebijakan.
- g. Membuat tulisan.

5.2.3. ADOPSI METODE DAN MODUL

Metode berupa gabungan diskusi di kelas dan praktik langsung di masyarakat sangat efektif untuk mendorong kepemimpinan perempuan, sehingga perlu diadopsi di desa-desa lain. Sedangkan untuk modul pelatihan, karena pemerintah dan organisasi pelaksana tidak bisa melaksanakan kegiatan selama 6–8 bulan seperti yang dilaksanakan oleh PEKKA, maka modul dapat dipilih yang sangat penting dan mendesak untuk dikuasai oleh peserta. Berdasarkan diskusi dengan kader PEKKA dan alumni Akademi Paradigta, tiga modul yang paling penting adalah:

- a. Perempuan dan Desa Harapan;
- b. Sungai Kehidupan (Perempuan Pemimpin); dan
- c. Rancangan APB Desa.

Dengan demikian, ada tiga modul yang direkomendasikan yaitu:

- a. Modul 2 (Perempuan Pemimpin),
- b. Modul 4 (Perempuan dan Desa Harapan), dan
- c. Modul 6 (Perempuan dalam Ranah Tata Kelola Desa).

Untuk memastikan peran peserta dalam mengorganisasi perempuan dan melakukan advokasi di desa, maka:

- a. Modul 8 (Perempuan Mengorganisasi Desa), dan
- b. Modul 9 (Advokasi Kebijakan untuk Perubahan Sosial)

juga penting untuk dilaksanakan dalam pelatihan dan praktiknya di masyarakat. Sehingga secara keseluruhan, lima modul utama yang bisa menjadi prioritas untuk replikasi di banyak desa lainnya adalah Modul 2, 4, 6, 8, dan 9.²⁴

²⁴ Modul-modul ini adalah versi 2018, yang merupakan penyempurnaan dari modul sebelumnya di tahun 2016. Pada tahun 2020, PEKKA juga menyempurnakan modul-modul tersebut, berdasarkan dari pembelajaran selama pelaksanaan Akademi Paradigta periode 2016-2020. Akan tetapi pembaharuan modul yang terakhir tersebut saat ini belum difinalkan dan dicetak.

Dalam pelaksanaannya, penyampaian isi modul dapat menggunakan beragam metode sesuai dengan konteks dan kebutuhan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, sebelum memberikan sesi pelatihan kepada peserta, mentor diminta membuat rencana fasilitasi yang menjelaskan tahapan secara detail proses penyampaian sebuah modul. Dalam penyusunan rencana fasilitasi tersebut, mentor dapat menggunakan atau mengadopsi metode yang dianggapnya lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta.

5.2.4. OPTIMALISASI KOLABORASI DENGAN ORGANISASI PEREMPUAN

Dalam praktik aksi di masyarakat, peserta perlu bekerja sama dengan organisasi perempuan yang ada di desa. Karena praktik aksi dilakukan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan perempuan, advokasi layanan untuk perempuan, partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, maka keterlibatan peserta dalam organisasi perempuan di desa, seperti PKK atau organisasi lainnya akan menentukan efektivitas kegiatan tersebut. Keanggotaan tersebut akan menyesuaikan dengan organisasi pelaksana atau organisasi perempuan yang ada di tingkat desa.

5.2.5. PEMBIAYAAN DARI PEMERINTAH DESA DAN KABUPATEN

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pemerintah desa sudah memiliki kode anggaran khusus untuk kegiatan pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan. Sehingga pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran secara langsung untuk kegiatan pelatihan kepemimpinan perempuan, yang dimasukkan dalam dokumen APB Desa. Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 juga menyebutkan beberapa kegiatan untuk pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan dengan menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2020. Karena sudah menjadi praktik baik, prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun-tahun mendatang juga mungkin akan tetap memasukkan kegiatan tersebut.

Pelaksanaan pelatihan kepemimpinan perempuan juga dapat didukung melalui program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sebagai bentuk dari pelaksanaan SE Kementerian Dalam Negeri Nomor 460/813/SJ yang ditujukan kepada Gubernur dan SE Nomor 460/812/SJ tanggal 28 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Contoh dari Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat) melalui replikasi Akademi Paradigta dan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur) melalui program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan atau disebut 'Sepeda Keren' (Tenola 2019) dapat menjadi sarana untuk mengalokasikan dana pemerintah kabupaten dalam rangka membangun kepemimpinan perempuan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

LITERATUR:

Aisiyiyah. t.t. "Seribu Tahun Panggung Pergerakan Perempuan." Diakses 25 Juli 2020. www.aisiyiyah.or.id.

Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur. 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas P3AKB Tahun 2019.

Duta Seleparang. 2020. "Musrenbang Khusus Perempuan, Seribu Lebih Perempuan di NTB Sudah Belajar Berencana." Duta Seleparang, Januari 11. Diakses 20 Agustus 2020.

<https://dutaselaparang.com/musrenbang-khusus-perempuan-seribu-lebih-perempuan-di-ntb-sudah-belajar-berencana/>

Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur. 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas P3AKB Tahun 2019. Diakses 26 Juli 2020. <http://p3akb.lomboktimurkab.go.id/semua-download.html>.

Faisal, Abu. 2020. "Pemda Diwajibkan Buat Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak." *AntaraneWS*, Februari 2. Diakses 20 Agustus 2020. <https://www.antaraneWS.com/berita/1275521/pemda-diwajibkan-buat-program-pemberdayaan-perempuan-dan-anak>

Fatayat NU. t.t. "Sejarah Singkat Organisasi." Diakses 25 Juli 2020. <http://fatayatnu.or.id/sejarah/>.

Institut KAPAL Perempuan. 2016. Modul Pendidikan Feminis Seri 1 Untuk Aktivist.

Kabupaten Lombok Utara. 2019. Pemkab Lombok Utara Gelar Musrenbang Perempuan dan Anak Tahun 2020. <http://portal.lombokutarakab.go.id/berita/498-pemkab-lombok-utara-gelar-musrenbang-perempuan-dan-anak-tahun-2020>. Diakses 20 Agustus 2020.

Kapal Perempuan. 2019. "Profil Sekolah Perempuan." Juli 9. Diakses 25 Juli 2020. <https://kapalperempuan.org/profil-sekolah-perempuan/>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2017. MODUL Jilid 2: Kepemimpinan Perempuan di Desa.

Kowani. t.t. "Fatayat NU : Sejarah dan Perkembangan Organisasi." Diakses 23 Agustus 2020. <https://kowani.or.id/fatayat-nu/>.

NU Online. 2015. "Sekelumit Profil, Sejarah dan Prestasi Muslimat NU." Maret 30. <https://www.nu.or.id/post/read/58517/sekelumit-profil-sejarah-dan-prestasi-muslimat-nu>.

NU Online. 2019. "Kiprah Cemerlang Muslimat NU di Usia 73 Tahun." Januari 19. Diakses 23 Agustus 2020. <https://www.nu.or.id/post/read/101927/kiprah-cemerlang-muslimat-nu-di-usia-73-tahun>.

PEKKA. 2017. *Akademi Paradigta: Modul Pendidikan Kepemimpinan Perempuan Desa*. Jakarta: PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga).

PEKKA. t.t. Modul 1. Mengawali Pendidikan Paradigta.

PEKKA. t.t. "Latar Belakang." Diakses 25 Juli 2020. <https://pekka.or.id/latar-belakang/>.

Pulu L, dkk. 2006. *Modul Pendidikan Adil Gender Untuk Perempuan Marginal*. Seri Pendidikan Feminis. Jakarta: KAPAL Perempuan.

Riadi, Muchlisin. 2019. Pemberdayaan Perempuan (Tujuan, Strategi, Program dan Indikator). <https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pemberdayaan-perempuan-tujuan-strategi-program-dan-indikator.html>.

Soetjipto, Ani.W. dan Shelly Adelina. 2013. Suara Dari Desa: Menuju Revitalisasi PKK. Jakarta: Marjin Kiri.

Tenola, Dida. 2019. "Sepeda Keren, Inovasi Trenggalek untuk Wujudkan Pembangunan Inklusif." IDN Yimes Jatim, November 21. Diakses 25 September 2020. <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/dida-tenola/sepeda-keren-inovasi-trenggalek-untuk-wujudkan-pembangunan-inklusif/4>

LAMPIRAN 1.

URAIAN FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA AKADEMI PARADIGTA

NO	PELAKSANA	FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Koordinator Pendidikan Kader PEKKA (tingkat nasional)	<p>Koordinator pendidikan kader tingkat nasional adalah staf Seknas yang ada di Jakarta yang diberi tanggung jawab untuk mengoordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan kader di wilayah PEKKA.</p> <p>Tugas dan tanggung jawab koordinator pendidikan kader tingkat nasional adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan kader desa secara nasional. • Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan belajar pendidikan kader desa secara nasional. • Memastikan kegiatan pembelajaran di wilayah berjalan. • Menjaga kualitas pembelajaran. • Mengevaluasi hasil kegiatan belajar mengajar. • Berkoordinasi dengan divisi lain di Seknas PEKKA untuk kelancaran jalannya pendidikan kader di wilayah. • Membuat rekap laporan rutin kegiatan belajar pendidikan kader dari wilayah. • Memeriksa pengajuan anggaran kegiatan belajar dari wilayah. • Bertanggung jawab pada Deputi dan Direktur PEKKA atas pelaksanaan kegiatan belajar pendidikan kader PEKKA.
2.	Koordinator Akademi Paradigta Wilayah (tingkat daerah)	<p>Koordinator Akademi Paradigta Wilayah adalah staf Seknas yang berada di wilayah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Akademi Paradigta.</p> <p>Tugas dan tanggung jawab koordinator Akademi Paradigta wilayah adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selama kegiatan pendidikan berlangsung. • Memastikan kualitas proses pembelajaran berjalan dengan baik. • Mengoordinasikan sumber daya di wilayah kerjanya untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. • Membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan kader PEKKA. • Memastikan ketersediaan sarana, media, dan bahan belajar. • Bersama mentor membuat kalender akademik kegiatan belajar. • Membuat anggaran tahunan bersama mentor. • Memastikan peran-peran mentor berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. • Berkoordinasi dan bertanggung jawab dengan Koordinator Nasional. • Memfasilitasi konflik dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. • Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan pendidikan kader PEKKA yang menjadi tanggung jawabnya.

NO	PELAKSANA	FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
3.	Mentor (tingkat desa)	<p>Mentor adalah kader desa PEKKA yang telah mendapatkan pelatihan mentor Pendidikan Kader Desa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan belajar pendidikan kader di desa.</p> <p>Tugas dan tanggung jawab mentor adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pendidikan kader desa di wilayahnya. • Mengidentifikasi dan menyeleksi peserta belajar. • Mendata peserta sesuai dengan format yang telah disediakan. • Menyiapkan kelas belajar. • Menyiapkan sarana dan bahan ajar. • Memastikan kegiatan berlangsung sesuai dengan kalender akademik. • Mendokumentasikan hasil penugasan peserta belajar. • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan belajar di dalam dan luar kelas. • Membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan kader desa. • Berkoordinasi dengan penanggung jawab wilayah dan koordinator nasional. • Berkoordinasi dengan pengurus serikat di wilayahnya. • Membuat usulan anggaran ke pengurus serikat di wilayahnya. • Mengelola anggaran rutin bulanan. • Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan belajar di wilayahnya. • Membuat laporan kegiatan dan keuangan bulanan dan diserahkan ke pengurus serikat dan penanggung jawab wilayah.
4.	Akademia (di desa)	<p>Akademia adalah peserta belajar kegiatan pendidikan kader desa yang terdiri dari anggota Serikat Pekka ataupun perempuan yang memiliki komitmen dan kepedulian kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah menjadi anggota Serikat Pekka atau telah berpengalaman sebagai penggerak masyarakat minimal enam bulan. • Memiliki kemampuan membaca dan menulis. • Memahami Bahasa Indonesia. • Bersedia mengikuti kegiatan belajar selama 1 tahun. • Direkomendasikan oleh Serikat Pekka atau pemerintah desa setempat. • Memiliki rekam jejak yang baik. • Usia 20–55 tahun

ISBN 978-623-6080-17-7 (PDF)



9 786236 080177